

Peta Jalan Penguatan Ekosistem Inovasi
Kemandirian dalam Kerangka Pembangunan
Kawasan Perdesaan



Laporan Kajian dan Rekomendasi

PETA JALAN PENGUATAN EKOSISTEM INOVASI KEMANDIRIAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bone Bolango



**Peta Jalan Penguatan Ekosistem Inovasi Kemandirian dalam
Kerangka Pembangunan Kawasan Perdesaan**
@Sanggarinovasidesa.id, Yogyakarta, 2021

Penyusun:

Aditya Mahendra Putra

Achmad Musyaddad

Tata letak isi: Fitriana Hadi

Penata Sampul: M. Zidny Kaffa

Cetakan pertama, November 2021
xii+120 hal., 14 x 20 cm.

Diterbitkan oleh:

Yayasan Sanggar Inovasi Desa

Kompleks Kampoeng Mataraman

Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,

Panggungharjo, Yogyakarta

Web: www.sanggarinovasidesa.id

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku

Kata Pengantar

Hari ini, kita jarang mendengar narasi megah tentang revolusi industri, *singularity*, ataupun kecermatan rasio untuk kemenangan komparatif. Sebab ide tersebut menjadi kurang kontekstual ditengah pandemi dan juga resesi ekonomi yang menyertainya. Sebagai gantinya, narasi-narasi tersebut digantikan oleh narasi yang lebih kontekstual dan heroik seperti gotong royong dan solidaritas kemanusiaan. Gotong royong sebagai latar budaya nusantara terbukti menjadi benteng tangguh dalam membendung dampak pandemi. Setidaknya hipotesisi bahwa semakin subsisten suatu komunitas maka semakin kecil pula dampak pandemi yang dihadapi telah terbukti. Pandemi juga menyadarkan kita bahwa puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi politik adalah musyawarah, dan puncak relasi ekonomi adalah kerjasama. Ketiga hal ini adalah definisi operasional makna gotong royong.

Kembali ke akar, setidaknya laku hidup *new normal* merefleksikan gotong royong menjadi relevan diungkit kembali, diterapkan sebagai gagasan dalam berdesa. Memampukan desa dalam membangun ekosistem kemandirian juga berarti melakukan mobilisasi segala sumber daya yang ada di desa, serta memperkuat sistem pendukung diluar desa untuk menjamin iklim inovasi desa yang positif. Ini kiranya menjadi rujukan strategis percepatan pembangunan di Bone Bolango. Meletakkan kolaborasi haluan untuk mempersempit alineasi antardesa dengan memperkuat simpul lintas sektor dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan.

Gagasan pembangunan kawasan perdesaan meletakkan desa-desa yang berada dalam satu lingkup wilayah geografis dalam satu kesatuan potensi dan layanan. Pendekatan geospasial digunakan untuk menemukan kedekatan karakteristik antardesa baik karena unsur kesamaan potensi, peluang, maupun upaya konsolidasi sumberdaya sebagai dasar untuk menentukan konektivitas antardesa dalam melakukan percepatan pembangunan wilayah. Langkah ini merupakan upaya transformatif guna mewujudkan perbaikan sistemik mulai dari ruang pembangunan yang berkesadaran, distribusi manfaat yang inklusif, hingga ketersediaan sistem penjamin proses perubahan.

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Linkar Temu Kabupaten Lestari dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas ikhtiar bersama membangun masyarakat yang berdaulat. Tak lupa, apresiasi setinggi – tingginya kami sematkan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Bondawuna, Botubarani, Botutonuo, Molutabu dan Olele, yang telah kebersamai proses menemu kenali kekuatan, membangun imajinasi desa masa depan, mendefinisikan arah strategis perubahan, hingga mentransformasi perubahan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam capaian–capaian penyusunan model ekosistem inovasi kemandirian kawasan perdesaan ini. Dalam koridor program, perbaikan terus menerus dilakukan melalui proses evaluasi internal dan penerimaan input–input dari berbagai pihak. Akhirnya, narasi yang kami sajikan dalam laporan ini harapannya dapat memperkuat barisan ekosistem inovasi kemandirian desa sekaligus mendekatkan mimpi desa mandiri yang berdaulat.

Merdesa. Merdeka dari Desa !!

Yogyakarta, November 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Pendahuluan	1
1.1 Paradigma Pembangunan Desa Paska UU.6/2014.....	1
1.2 Arah Strategis Perubahan.....	3
1.3 Meletakkan Konektivitas – Kolaborasi dalam Kerangka Kawasan Perdesaan.....	7
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Bone Bolango: Sebuah Pilihan Tepat	15
2.1 Kajian Dokumen Perencanaan Daerah.....	15
2.2 Nilai Strategis.....	25
2.3 Fokus Pengembangan.....	29
2.4 Desain Metodologi Penyusunan Model.....	32

<i>Preliminary Assessment</i> - Pemahaman Konteks	
untuk Penyusunan Model yang Adaptif	37
3.1 Kondisi Umum Bone Bolango.....	37
3.2 Potret 5 Desa Lokus.....	48
Dinamika Tata Kelola Sumberdaya Desa	77
4.1 Rantai Pasok Bisnis Pengelolaan SDA Desa.....	77
4.2 Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi: Ketergantungan Ekonomi SDA dalam Pola Ekstraktif-Subsisten dan Jebakan Kelas Pekerja.....	95
4.3 Kapasitas Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya: Manajemen Rantai Manfaat dan Resiko Pengelolaan Sumberdaya Publik.....	97
4.4 Kapasitas Politik dalam Pengelolaan Sumberdaya: Leadership dan Governability dalam Inovasi Pengelolaan Sumberdaya Publik.....	100
Rancangan Model Pembangunan Kawasan Perdesaan	107
5.1 Konstruksi Model Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	107
5.2 Desain Model dan Tahapan Transisi Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	111
5.3 Desain Model Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Kerjasama Antardesa.....	114
Penutup	119

I

Pendahuluan

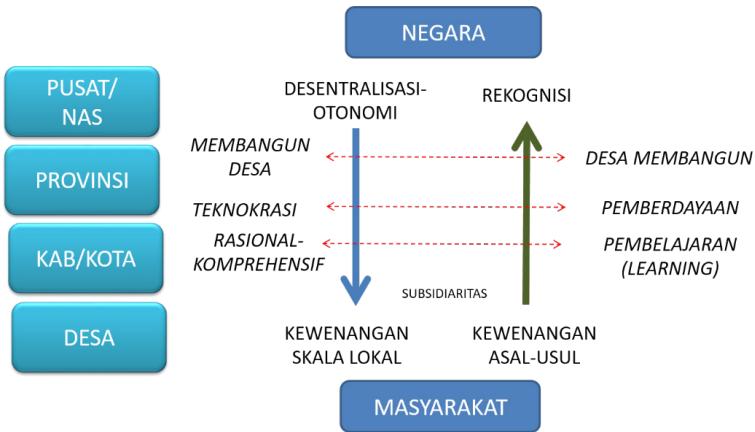
1.1 Paradigma Pembangunan Desa Paska UU.6/2014

Tren pembangunan perlahan mulai bergeser, dari yang sebelumnya kotasentris, kini percepatan pembangunan dengan memperkuat daerah – daerah pinggiran (desa) menjadi perspektif utama dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan programantik “membangun desa” kini berubah haluan menjadi “desa membangun”. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU Desa yang menempatkan desa sebagai subyek utama pembangunan melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa didorong sebagai aktor utama pembangunan itu sendiri, serta dituntut menjadi entitas yang mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa.

Dengan dua asas utama “rekognisi” dan “subsidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan asas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada asas desentralisasi dan residualitas, desa hanya menjadi bagian

dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Selanjutnya, desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa pendayagunaan anggaran.

Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan demikian, hubungan programatik antar herarki pemerintahan, dari yang sebelumnya kental muatan mandatori, kini ruang partisipasi mulai dibuka lebar.



Gambar 1. Rekonseptualisasi Desa Paska UU Desa 2014

Setidaknya ideasi pemberdayaan mensyaratkan adanya proses pembelajaran berbasis pengalaman. Setiap pengalaman dalam menggerakkan sendi-sendi pembangunan desa dijadikan *lessons learned* yang kemudian didokumentasikan dan didiskusikan guna menyempurnakan rute peta jalan gagasan kemandirian desa. Hingga pada titik tertentu, saintifikasi atas pengalaman dan praktik inovasi terdokumentasi sebagai produk pengetahuan untuk memperkaya khasanah - khasanah ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari praktik baik serta inovasi desa. Hasil dari pengelolaan pengetahuan ini akan mendorong lahirnya perspektif keilmuan yang lahir dari desa. Tujuan ini berdasar asumsi bahwa kerja - kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan rentang waktu lama memiliki penguasaan yang lebih riil dibandingkan dengan peneliti - peneliti, sivitas akademis yang pada banyak hal berjarak dengan masyarakat.

Proses pembelajaran atas pengalaman hingga penyempurnaan proses merupakan siklus sirkular dalam pengelolaan pembangunan desa, artinya proses observasi-evaluasi melekat pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan cara kerja ini, perbaikan terus menerus memungkinkan dilakukan dan *snowballing* keterlibatan lintaspihak akan menjadi ideal.

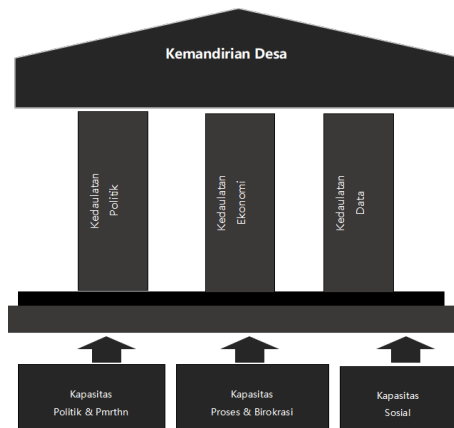
1.2 Arah Strategis Perubahan

Mendasarkan argumentasi – argumentasi yang telah disampaikan diatas, maka arah strategis pembangunan desa hendaknya merujuk pada dua sisi. Pertama pembangunan kedalam, artinya memperkuat kapasitas desa dalam mencapai kemandiriannya. Kedua, memperkuat ekosistem kolaborasi untuk mengakselerasi kemandirian desa.

1.2.1 Membangun Kapasitas Desa Mencapai Kemandiriannya

Sanggar Inovasi Desa, yang dibentuk Pemerintah Desa Panggungharjo dan beberapa tokoh pemerhati desa telah melakukan serangkaian proses, mulai dari dokumentasi perjalanan panjang Desa Panggungharjo dalam mencapai kemandiriannya, yang kemudian spektrumnya diperluas melalui interaksi – interaksi antar desa, hingga rumusan arah tatanan Indonesia baru dari desa sebagai buah gagasan Kongres Kebudayaan Desa. Kesimpulan yang didapat dari serangkaian proses yang dilakukan adalah formulasi ekosistem inovasi kemandirian desa dapat dicapai melalui “Tiga Pilar Kemandirian Desa”, yakni kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, serta kedaulatan data.

Kerangka politik yang bersih penting untuk menjamin proses birokrasi yang sehat. Ekonomi yang berdaulat menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal. Daulat atas data memungkinkan desa merumuskan arah strategis pembangunan desa, dengan kata lain menyelenggarakan demokrasi berbasis data (datakrasi). Ketiga pilar ini akan menyokong isu – isu strategis pembangunan desa.



Sebagai pondasi ketiga pilar tersebut, diperlukan “kapasitas”. Inilah yang akan menjadi bagian integral desa dalam mendayagunakan segala aset dan kewenangannya. Kapasitas dalam hal ini merujuk pada:

1. Kapasitas Politik dan Kepemimpinan, yakni kapasitas yang dimiliki kepala desa
2. Kapasitas Proses dan Birokrasi, yakni kapasitas yang dimiliki aparatur pemerintah desa, dan
3. Kapasitas Sosial, yakni kapasitas yang dimiliki masyarakat desa

Kapasitas politik dan kepemimpinan dibutuhkan agar kepala desa mempunyai kemampuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Setidaknya terdapat 5 kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh kepala desa, yaitu Kapasitas Regulasi, Kapasitas Esktraktif, Kapasitas Distributif, Kapasitas Responsif dan Kapasitas Jaringan.

Kapasitas proses dan birokrasi dari aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan menggunakan pendekatan Reformasi Birokrasi yang diawali dengan mendorong perluasan dimensi pelayanan

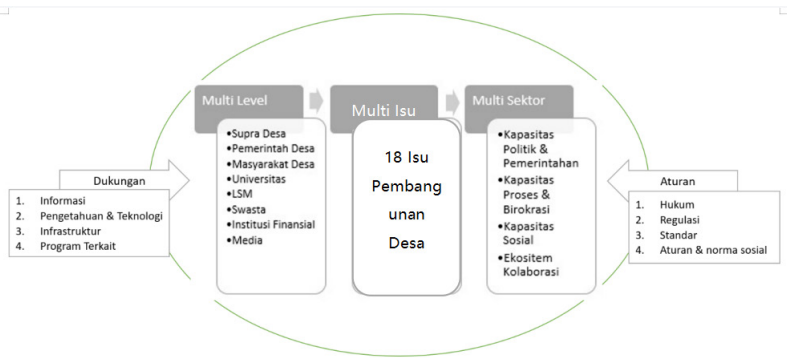


Gambar 3 Basis Kapasitas Pemerintahan Desa

publik untuk membangun relasi baru antara pemerintah dan warganya. Perluasan dimensi pelayanan publik akan mendorong penyesuaian tata kelembagaan desa, yang dilakukan dengan memandatkan sebagian fungsi dan kewenangan dari pemerintah desa kepada warga desa. Hal ini sekaligus akan membuka ruang partisipasi di satu sisi, hingga memperkuat kualitas partisipasi di sisi lain.

1.2.2 Ekosistem Kolaborasi Percepatan Kemandirian Desa

Meningkatkan kapasitas desa dalam mendaya gunakan aset dan kewenangannya, juga berarti merangsang sistem pendukung di sekitarnya. Maka diperlukan pendekatan yang koheren dan tegas untuk memahami konteks hingga melakukan intervensi dalam suatu sistem agar rantai nilai berfungsi efektif. Pendekatan holistik akan memiliki *impact* yang lebih besar: program yang terkoordinasi atas multi level, multi platform, dan multi sektor akan memberi dampak yang lebih besar. Penguatan ekosistem kemandirian desa mewujudkan pada setiap level, hal ini dipahami sebagai sebuah ekosistem model. Intervensi hanya pada satu level atau hanya menggunakan satu pendekatan mungkin akan cukup berhasil, tetapi tidak cukup berdampak.



Gambar 4. Interoperabilitas Ekosistem Inovasi Kemandirian Desa

Konektivitas perlu dimanifestasikan dalam ketersediaan medium yang mampu menjembatani interaksi antar desa untuk saling menemukan eksistensi sebagai komunitas, menemukan kekuatan bersama, hingga mendialogkan tema perubahan. Membangun konektivitas artinya menstimulasi lahirnya kolaborasi antar desa, dan/ atau antar desa dengan pihak lain dalam berbagai bidang. Meletakkan konektivitas - kolaborasi sebagai perspektif utama sangat penting dalam rangka merevitalisasi jejaring antar desa yang menguat melalui fasilitasi diskusi, membangun laboratorium inovasi desa, hingga *program matching* antar aktor kunci. Hal ini sekaligus sebagai basis perubahan sistemik, yang memungkinkan tumbuhnya hub untuk saling bekerjasama, media saling belajar, hingga moderasi peran lintas pihak.

1.3 Meletakkan Konektivitas - Kolaborasi dalam Kerangka Kawasan Perdesaan

Sesuai ruh ideologis lahirnya UU Desa beserta seperangkat aturan turunan yang menyertainya, bahwa perubahan hendaknya diletakkan pada inisiatif kolektif masyarakat desa untuk menemukan kekuatan bersama, impian serta solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan, serta menguatkan eksistensi diri sebagai komunitas. Artinya kontekstualitas kelokalan yang menjadi sumber kekuatan disetiap wilayah hendaknya menjadi perspektif utama dimana arah strategis pembangunan dimulai.

Kemiripan sumber daya (baik *tangible* maupun *intangibile*), peluang dan tantangan antardesa dalam satu wilayah adalah keniscayaan. Kemiripan karakteristik antardesa ini merupakan nilai startegis untuk percepatan pelayanan publik dan agregator sektor produktif di desa. Imajinasi tentang membangun ekosistem tata pemerintahan yang transformatif, pengelolaan sumber – sumber

daya untuk membangun kemandirian ekonomi secara kolaboratif, hingga aktualisasi pengetahuan lokal melalui pemberkuasaan atas data dan informasi perlu terus didorong melalui kerja – kerja kolektif. Yang pada akhirnya akan terwujud kultur kebijakan arah strategis pembangunan berbasis bukti (data).

Namun, bayangan ideal menjadikan desa yang berdaulat penuh atas diri mereka sendiri bukanlah jalan mudah. Membayangkan desa yang ideal, tidak serta merta terlepas dari peran positif ekosistem pendukungnya. Disinilah sasaran strategis meletakkan konektivitas-kolaborasi dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan; mengkatalisasi peran lintas pihak dengan membuka ruang partisipasi disatu sisi serta meningkatkan kualitas partisipasi disisi lain.

1.3.1 Kerangka Gagasan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya mengonsolidasikan kebutuhan, potensi, dan sumberdaya antar desa agar mampu saling menopang dan bekerjasama dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara administratif spasial, cakupan kawasan perdesaan adalah desa-desa yang berada dalam wilayah kabupaten/ kota yang sama. Pendekatan geospasial digunakan untuk menemukan kedekatan karakteristik antardesa baik dari unsur kesamaan potensi, peluang, maupun kesalingtergantungan sumberdaya sebagai dasar untuk menentukan konektivitas antardesa dalam melakukan percepatan pembangunan wilayah.

Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan, baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun kebijakan yang dapat menstimulir pembangunan ekonomi wila-

yah dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diletakkan pada terciptanya 4 (empat) daya dukung fungsi kawasan, yaitu: (1) tempat permukiman perdesaan; (2) pelayanan jasa pemerintahan; (3) pelayanan sosial, dan (4) kegiatan ekonomi.

Lingkup pembangunan kawasan perdesaan yang dapat diselenggarakan sangat luas, baik pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Pasal 123 ayat (2) PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, merinci lingkup pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Pasal 84 ayat (3) UU.6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam peraturan daerah. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, serta sinergisme antar sektor, “pasar”, dan masyarakat dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor.

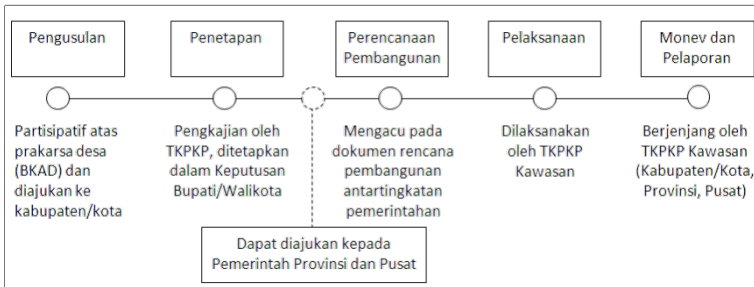
1.3.2 Kerangka Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan adalah urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, semua kebijakan yang diberlakukan harus melibatkan masyarakat desa. Lingkup program pembangunan dari pemerintah supradesa dibatasi pada ruang konektivitas dan kolaborasi antardesa. Dalam hal skala program terbatas pada lokal desa, maka wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antardesa, sebagai wujud pengakuan terhadap kewenangan asal-usul dan skala lokal desa.

Program pemerintah supradesa dalam lingkup kawasan perdesaan harus mengarusutamakan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan. Oleh sebab itu, pembangunan kawasan perdesaan harus memperhatikan beberapa aspek sekaligus, yaitu: (1) kegiatan pertanian dalam arti luas (sektor yang umumnya menjadi penopang ekonomi desa); (2) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; (3) tempat permukiman perdesaan; (4) tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan; (5) nilai strategis dan prioritas kawasan; (6) keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/ kota; (7) kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan (8) keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pengaturan operasional kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Regulasi tersebut

mengatur mulai tata cara pembentukan, penyelenggaraan, kelembagaan, pendanaan, serta pembinaan pembangunan kawasan perdesaan dari level pusat hingga daerah dan desa. Pembagian kewenangan terdistribusi dalam peran parapihak dalam seluruh tahapan pengelolaan proses kebijakan, dari perencanaan sampai dengan evaluasi.



Gambar 5. Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Usulan kebutuhan pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh desa kepada pemerintah kabupaten/ kota setelah melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta ketersediaan sarana dan prasarana desa. Penetapan oleh pemerintah kabupaten/ kota, melalui keputusan bupati/ walikota, dilakukan setelah melalui kajian atas usulan pemerintah desa untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/ kota.

Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan oleh kabupaten/ kota dapat diajukan kepada gubernur dan kepada pemerintah pusat melalui gubernur jika memang dinilai mewakili kebutuhan dan kepentingan yang lebih luas. Setelah ditetapkan, berbagai program pembangunan lintas tingkatan pemerintahan

diorientasikan dalam desain dan prioritas pembangunan kawasan perdesaan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan pemerintahan.

II

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Bone Bolango: Sebuah Pilihan Tepat

2.1 Kajian Dokumen Perencanaan Daerah

2.1.1 RPJPD Bone Bolango 2005 - 2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone Bolango tahun 2011–2025 adalah mewujudkan “Bone Bolango Maju dan Bermartabat”. Untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 2005-2025, selanjutnya dijabarkan dalam misi pembangunan beserta sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Misi 1: Terwujudnya Perekonomian Bone Bolango yang Maju dan Berdaya Saing

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan diatas rata-rata pertumbuhan provinsi, dan memberikan *multiplier effect* pada perluasan kesempatan kerja dan pengurangan penduduk miskin.

- b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan lokal dengan semakin memperkuat peran sektor sekunder dan sektor tersier yang memiliki konektivitas dengan sektor primer.
- c. Tumbuhnya usaha ekonomi pedesaan yang mendukung penguatan ekonomi daerah.
- d. Terwujudnya produk unggulan daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan peluang dan sumber daya alam loikal secara merata dan berkelanjutan.
- e. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk seluruh masyarakat.
- f. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin dibawah angka rata-rata nasional.
- g. Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten.
- h. Terwujudnya peningkatan investasi yang menggerakkan perekonomian masyarakat.

Misi 2: Terwujudnya Masyarakat Bone Bolango yang Berkualitas

- a. Tumbuhnya karakter masyarakat yang tangguh, disiplin, taat hukum, kompetitif, berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, dinamis dan berwawasan IPTEK.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata, adil dan berdaya saing.
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Misi 3: Merwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- a. Terwujudnya reformasi birokrasi dan perbaikan kapasitas kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dan handal dalam menjalankan amanah rakyat.
- b. Terwujudnya peningkatan kompetensi, disiplin, profesionalisme dan etika aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- c. Tersedianya pelayanan publik yang prima dan menjunjung tinggi aspirasi dan dinamika masyarakat.
- d. Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kerangka *good governance*.
- e. Terciptanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.
- f. Terciptanya komunikasi dan kemitraan yang konstruktif antar eksekutif, legislatif dan penyelenggara pemerintahan lainnya.

2.1.2 RPJMD Bone Bolango 2016 - 2021

Arah prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango untuk RPJMD 2015 – 2021 diarahkan pada percepatan pengembangan wilayah melalui pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan untuk mewujudkan masyarakat maju dan bermartabat menuju **Bone Bolango Cemerlang**. Arah utama kebijakan pembangunan tersebut dilakukan melalui:

- a. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan.
- b. Peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan bersih dan berwibawa.
- c. Peningkatan kualitas layanan publik.

- d. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin bermutu.
- e. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
- f. Peningkatan pendapatan masyarakat.
- g. Pengembangan produk unggulan daerah.
- h. Percepatan pengembangan infrastruktur dasar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi pembangunan antar wilayah.
- i. Percepatan penataan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan.
- j. Pengembangan kawasan-kawasan strategis.
- k. Pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

2.1.3 Isu Strategis

Mendasarkan pada RPJMD Bone Bolango tahun 2016 – 2021, terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah yang kami rangkum dalam poin-poin dibawah ini.

1. **Kemiskinan**, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:
 - a. Intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
 - b. Kebijakan fiskal dan investasi bagi pengentasan kemiskinan.
 - c. Sinergitas dan integrasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
 - d. Targetting sasaran penanggulangan kemiskinan.
 - e. Peran aktif kelembagaan program penanggulangan kemiskinan.
 - f. Pengendalian faktor-faktor eksternal seperti inflasi.
 - g. Budaya masyarakat dan peran aktif masyarakat.

h. Keterlibatan peran aktif pihak dunia usaha dan kelembagaan lainnya.

2. Penguatan Basis Ekonomi Daerah, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

a. Pengembangan simpul-simpul ekonomi wilayah seperti pusat perdagangan utama yang menjadi mobilisator percepatan pembangunan wilayah.

b. Pengembangan basis-basis ekonomi daerah serta kawasan ekonomi yang berbasis kompetensi inti industri daerah.

c. Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah dan kawasan cepat tumbuh.

d. Persebaran prasarana ekonomi serta ketersediaan infrastruktur wilayah.

e. Pengembangan komoditas unggulan yang menjadi sektor basis.

f. Belum terintegrasinya pembangunan antar sector sektor ekonomi dengan pola integrasi dari hulu ke hilir.

g. Pembangunan ekonomi yang didukung peran aktif investasi swasta

h. Kebijakan fiskal daerah.

i. Peranan kelembagaan ekonomi.

3. Percepatan Pembangunan Desa, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

a. Pengentasan desa tertinggal dan kemandirian desa.

b. Pengembangan infrastruktur pedesaan termasuk infrastruktur aksesibilitas wilayah pada desa-desa terpencil dan terisolasi.

c. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pemerintahan khususnya desa-desa pemekaran.

- d. Kebijakan fiskal yang menstimulir pembangunan pedesaan.
- e. Pertumbuhan usaha ekonomi desa termasuk peran BUM-Des.
- f. Potensi unggulan desa yang belum didayagunakan menjadi *leading* komoditas sebagai basis pertumbuhan desa..
- g. Optimalisasi kelembagaan desa.
- h. Partisipasti masyarakat dan dunia usaha pedesaan.
- i. Kemampuan pengelolaan keuangan desa.
- j. Kerjasama antar desa yang belum dikembangkan.
- k. Penataan ruang desa yang belum terarah.

4. Penataan Ruang, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

- a. Regulasi spasial khususnya rencana-rencana rinci yang menjadi arahan penataan ruang daerah.
- b. Mindset dan kapasitas aparatur daerah dalam upaya penataan ruang.
- c. Pembentukan struktur dan pola ruang wilayah.
- d. Pengembangan simpul-simpul pertumbuhan wilayah serta belum kuatnya karakter pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
- e. Daya ungkit dan daya tarik PKW(p) Suwawa sebagai ibu kota pemerintahan untuk menjadi simpul pertumbuhan dan penguat konektivitas antar wilayah.
- f. Konektivitas antar wilayah pengembangan khususnya lintas utara dan lintas selatan yang lemah.
- g. Penataan ruang kawasan-kawasan strategis dan kawasan prioritas.
- h. Pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah.

- i. Penataan sistem pengelolaan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang serta siergitas antar sektor dan antar wilayah.

5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

- a. Penguatan aksesibilitas wilayah dengan mengembangkan ketersediaan akses jalan serta kualitas jalan.
- b. Keterisolasian beberapa wilayah sebagai akibat infrastruktur yang kurang memadai.
- c. Pengembangan fasilitas terminal sesuai rencana tata ruang yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah.
- d. Cakupan layanan energi listrik untuk masyarakat khususnya diwilayah pedesaan dan pengembangan usaha ekonomi dan investasi.
- e. Fasilitas penerangan jalan serta ruang-ruang publik termasuk pada kawasan perkotaan.
- f. Cakupan layanan air bersih baik sektor perdesaan dan wilayah
- g. perkotaan untuk memenuhi kebutuhan semua rumah tangga dan aktivitas sosial ekonomi.
- h. Cakupan layanan sanitasi khususnya pada wilayah pedesaan.
- i. Pengembangan fasilitas pengelolaan limbah.
- j. Pengembangan infrastruktur pemukiman termasuk pengembangan wilayah KASIBA Kabupaten Bone Bolango.
- k. Kualitas hunian masyarakat dan lingkungan pemukiman.
- l. Dukungan infrastruktur pada kawasan strategis atau kawasan pengembangan ekonomi daerah untuk kepentingan pariwisata, perdagangan, dan jasa.

- m. Pengembangan prasarana perdagangan kabila serta Pusat Kegiatan Lokal lainnya untuk menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi daerah.
- n. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Rumah Sakit Toto Kabila dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan rujukan.

6. Tata Kelola Pemerintahan, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

- a. Kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur, cultureset dan mindset aparatur, spirit untuk berkompetisi dan lebih produktif, kreatif dan inovatif, serta dibarengi sikap disiplin dan integritas aparatur.
- b. Penataan administrasi pemerintahan pada semua jenjang dan unit pemerintahan daerah.
- c. Kapasitas dan kinerja perencanaan daerah.
- d. Pengawasan dan system pengendalian internal pemerintah.
- e. Pengendalian pembangunan daerah.
- f. Akuntabilitas kinerja pemerintahan.
- g. Kinerja legislasi daerah.
- h. Sinergitas dan integrasi tugas dan fungsi pemerintahan.
- i. Pembenahan integrasi dan kualitas layanan publik.
- j. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pemerintahan.
- k. Penataan organisasi dan manajemen yang lebih responsive, produktif, dan kompetitif menjadi isu penting menunjang upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- l. Penataan sistem kepegawaian.
- m. Pelayanan publik yang prima, inovatif dan responsif.
- n. Sarana dan prasarana pemerintahan.
- o. Kapasitas fiskal daerah.

7. Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

- a. Keterjangkauan, partisipasi dan kualitas pendidikan.
 - Keterjangkauan : akses dan pembiayaan pendidikan
 - Kualitas pendidikan: SDM pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta manajemen pendidikan.
 - Partisipasi pendidikan dan mutu lulusan.
 - Peran serta masyarakat bagi keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah.
 - Penguatan kelembagaan pendidikan.
- b. Jaminan dan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan :
 - Kesehatan ibu, bayi, dan balita: kematian ibu, bayi, balita; gizi ibu, bayi dan balita; cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil.
 - Penanganan gizi buruk.
 - Penanganan penyakit menular dan penyakit tertentu.
 - Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan: keikutsertaan peserta BPJS.
 - SDM medis dan paramedis, sarana dan prasarana kesehatan.
 - Promosi, Jejaring, dan partisipasi masyarakat.
- c. Penyehatan lingkungan: perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit (menular dan non menular).

8. Kemitraan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

- a. Penguatan kelembagaan; unit pelayanan, regulasi, pelimpahan kewenangan dan aparatur yang profesional.
- b. Pelayanan perijinan usaha terpadu atau pelayanan perizinan satu pintu.
- c. Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah.
- d. Stabilitas wilayah: kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, iklim politik.
- e. Promosi.
- f. Akses permodalan.
- g. Penciptaan sentra-sentra ekonomi.
- h. Kerjasama antar wilayah.
- i. Kerjasama antar pemerintahan.

9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, beberapa isu fundamental dalam aspek ini antaranya:

- a. Pengelolaan potensi tambang dan galian baik oleh masyarakat maupun dunia usaha.
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya air.
- c. Pengelolaan sumber daya lahan produktif pada kawasan budidaya.
- d. Pendayagunaan potensi alam bagi pariwisata.
- e. Konservasi sumber daya alam.
- f. Penanganan kawasan konservasi khususnya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan Konservasi Laut Daerah Olele, dan kawasan lindung lainnya.
- g. Alih fungsi lahan pertanian.
- h. Pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan.

2.1.4 Kebijakan Tata Ruang di 5 Desa Sasaran Program

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango 2011 – 2031 menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) wilayah Kabila Bone berada di Huangobotu. Pembangunan pelabuhan laut berskala regional dipertimbangkan untuk menggantikan fungsi pelabuhan Kota Gorontalo dalam melayani kebutuhan terutama untuk angkutan penumpang dan barang. Fungsi pelabuhan regional agar dapat menghubungkan Bone Bolango dengan wilayah timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan ke seluruh provinsi di Sulawesi. Rencana pembangunan prasarana transportasi laut diarahkan pada pembangunan pelabuhan laut di Kabila Bone dan revitalisasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Inengo Kecamatan Kabila Bone.

Kabila Bone merupakan kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya laut dan konservasi terumbu karang, serta pengembangan kawasan pengolahan ikan. Kabila Bone juga menyimpan potensi pertambangan bukan logam (batu gamping) di Desa Olele, Oluhuta, Molotabu dan Botutonuo. Sementara sepanjang pantai Botutonuo-Molutabu-Huangobotu dan taman laut Olele merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Kawasan konservasi laut Olele seluas 2.460 ha, secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 3.000 ha pada tahun 2031

2.2 Nilai Strategis

Pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang telah direkognisi negara. Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal maka akan menyatukan seluruh entitas bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian

nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangga nama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.

Namun, kewenangan-kewenangan itu kini diuji oleh Pandemi. Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Mesin produksi macet, daya beli turun dan transaksi pun lesu. Angka kemiskinan yang bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Kondisi ini pun menyebabkan bergesernya pola konsumsi yang menyeluruh pada setiap sektor. Tak terkecuali pada sektor pemerintahan, penyesuaian anggaran dilakukan pada setiap herarki pemerintahan. Pada tahap ini, segala basis kapasitas yang berasal dari dalam menjadi *problem reliever* menghadapi dampak sosial ekonomi yang muncul. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango merespons situasi pandemi dengan melakukan perubahan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Perbup No.19/2020 tentang Perubahan Kedua tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.069.344.923.301,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 2.480.382.450,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.071.825.305.751,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.076.755.535.716,39
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp 4.325.382.450,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.081.080.918.166,39
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 1.845.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 18.710.612.415,39

Pada level desa, refocusing anggaran dilakukan utamanya dalam bentuk program padat karya tunai untuk menopang mereka yang rentan. Covid-19 juga telah menyadarkan kita bahwa puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi politik adalah musyawarah, dan puncak relasi ekonomi adalah kerjasama. Ketiga hal tersebut merupakan definisi operasional dari nilai khas nusantara, yakni gotong royong. Dengan demikian konsepsi kolaborasi – *economic of sharing* – solidaritas menjadi *value* yang terus menguat dalam menghadapi gempuran pandemi.

Melihat dinamika pembangunan desa dalam konteks nasional, lahirnya UU Desa, telah merubah cara pandang negara terhadap desa. Pada prinsipnya, kemandirian desa terletak pada kemampuan desa mengelola segala kewenangan yang diberikan serta aset yang didistribusi. Berbicara tentang desa, tentunya tidak terlepas dari hipotesis bahwa desa adalah basis produksi untuk mensuplai kebutuhan bagi dirinya sendiri, dan bagi kebutuhan kota. Maka

pendekatan pembangunan model kawasan perdesaan merupakan salah satu strategi guna penguatan basis produksi dan layanan. Pengaturan teknis terkait penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan telah dituangkan dalam Permendesa PD TT No.5/2016.



Gambar 6. Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan di Bone Bolango

Kajian atas rencana pembangunan (yang akan kami ulas pada bab 3) mengindikasikan perlunya memperkuat kerja lintas-sektor menuju visi Bone Bolango Cemerlang. Kerangka dasar penyusunan rencana pembangunan tersebut (baik jangka panjang-menengah-pendek) tentunya tidak terlepas dari identifikasi atas kapasitas politik-sosial-ekonomi yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi.

Salah satu strategi mendorong upaya transformatif percepatan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat adalah melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan. Hal ini disadari betul oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango



Gambar 7. Diskusi Pra Assessment dengan Pemprov Gorontalo

melalui terbitnya Perbup No.16/2021 yang mengatur tentang Kawasan Desa Wisata. Yang kemudian lingkup teritorialnya ditetapkan melalui SK Bupati No.131/2021. Penerbitan regulasi daerah tersebut tentunya juga tidak terlepas upaya menyokong visi Bone Bolango Cemerlang yang diantaranya menjadikan: 1.) pemberdayaan masyarakat lokal dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal (*Community Empowerment*), dan 2.) Pembangunan Desa dengan tema “Desa Tumbuh Daerah Maju” (*Rural Empowerment*) sebagai agenda strategisnya.

2.3 Fokus Pengembangan

Ekstraksi berbagai kebijakan dan peraturan daerah tentu tidak terlepas dari hasil kajian permasalahan, potensi dan peluang yang ada di Kabupaten Bone Bolango, serta kuatnya isu konservasi,

pemajuan ekonomi dan tata pemerintahan yang baik, yang tercermin dalam berbagai regulasi yang diterbitkan. Maka fokus pengembangan dengan tema *Ekonomi Konservasi Sumber Daya sebagai Leading Issue/ Sector Pembangunan Kawasan Perdesaan* hendaknya menjadi basis nilai bersama lintaspihak dalam pembangunan kawasan perdesaan.

2.3.1 Orientasi

Idealnya regulasi pusat hingga regulasi daerah yang terbit sudah cukup menjadi payung kerja-kerja kolektif lintaspihak yang berorientasi pada :

- a. Mengembangkan potensi, pemecahan masalah, dan peluang pengembangan kawasan perdesaan,
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan
- c. Mengembangkan kolaborasi yang menstimulir pembangunan ekonomi wilayah melalui sinergisasi-harmonisasi-integrasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan para pihak pada/ terhadap kawasan perdesaan.

2.3.2 Tujuan

Secara umum, pembangunan kawasan perdesaan memiliki dua tujuan utama, yaitu :

- a. *Social/ Public Purpose*: Pengembangan kualitas pelayanan publik dalam kawasan (pemukiman, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial).
- b. *Economic Purpose*: Pengembangan aktivitas ekonomi kawasan (optimalisasi prudes dan prukades, menguatnya distribusi manfaat atas rantai pasok)

2.3.3 Lingkup

SK Bupati No.131/2021 menetapkan 25 desa sebagai kawasan desa wisata di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian dilakukan *screening* untuk menentukan “desa yang paling siap” dilokalisir sebagai kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan beberapa indikator kunci, yaitu :

- a. Aproksimasi jarak garis lurus (1 km dan 2 km) dari kawasan hutan
- b. Aproksimasi jarak garis lurus (1 km dan 2 km) dari kawasan pesisir
- c. Ketersediaan fasilitas pendidikan
- d. Ketersediaan fasilitas jalan

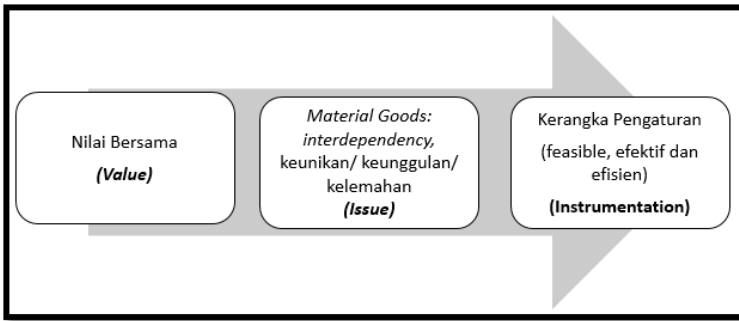
Berdasarkan pemenuhan indikator tersebut, maka dipilih 5 desa sasaran yang akan dijadikan lokus pengembangan kawasan perdesaan. Namun, tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu dan dinamika yang menyertai, terjadi pengurangan atau penambahan desa sasaran guna memperkuat aspek kebermanfaatan. Kelima desa tersebut adalah Desa Bondawuna di Kecamatan Suwawa Selatan, serta Desa Botubarani, Botutonuo, Molutabu dan Olele di Kecamatan Kabila Bone.



Gambar 9. Desa Lokus Program

2.4 Desain Metodologi Penyusunan Model

Metodologi penyusunan model kawasan perdesaan dilakukan dengan mensistematisasi model interkoneksi antara aspek nilai, isu, dan instrumen operasional dalam merangkai interkoneksi antardesa sebagai satu kesatuan, termasuk kesatuan kawasan. Konteks kesatuan tidak selalu berujung pada integrasi, namun juga kolaborasi dan agregasi.



Gambar 10. Kerangka Assessment Model Kawasan Perdesaan

Aspek nilai digunakan untuk memetakan hal-hal fundamental (struktural) yang tersambung bersama di dalam desa dan antardesa. Realitas faktual dari hal fundamental ini bisa saja dapat menyambungkan, namun juga diperebutkan/dipertentangkan. Korespondensi dari nilai yang ada ini selanjutnya diabstraksikan sebagai ketersambungan kebutuhan, masalah, ataupun peluang bersama.

Aspek isu digunakan untuk memetakan pada praktik sistemik yang terjalin korespondensi isunya pada masing-masing desa, atau bahkan telah beroperasi dalam relasi antardesa. Jaringan korespondensi pada aspek ini dicari dalam hal-hal material (kasat mata) yang dapat dilacak dalam aktivitas ekonomi dan sosial yang ada di

desa. Dari sini dimungkinkan pembacaan keunikan, keunggulan, maupun kelemahannya untuk dapat ditemukan keterkaitan atau interdependensinya (fungsional maupun non-fungsional).

Aspek instrumentasi berkenaan dengan memetakan sejauhmana korespondensi praktik sistemik yang saling terkait atau saling tergantung telah diwujudkan dalam kerangka kerja operasional. Kerangka operasional dapat mencakup hal ketersediaan dan muatan regulasi tingkat desa dan supradesa, karakteristik keterhubungan antarpihak/antarsistem dalam rantai pasok, proses bisnis dari aktivitas ekonomi warga, dan sebagainya.



III

Preliminary Assessment – Pemahaman Konteks untuk Penyusunan Model yang Adaptif

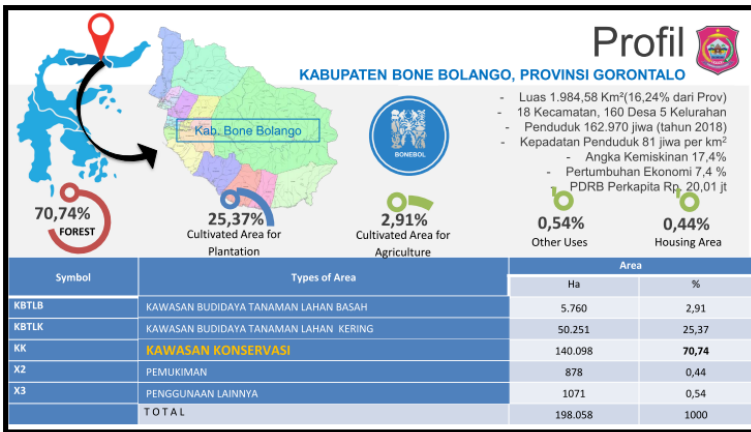
3.1 Kondisi Umum Bone Bolango

3.1.1 Kewilayahan

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 saat ini terdiri dari 18 kecamatan, 160 desa dan 5 kelurahan dengan luas wilayah 1984,58 km² dan luas lautan sebesar 392,68 km² dengan panjang pantai 61 km. Dengan luas wilayah tersebut maka Bone Bolango memiliki proporsi wilayah 16,24% dari luas Provinsi Gorontalo.

Yang menarik adalah 70,74% dari seluruh luas wilayah Bone Bolango merupakan kawasan hutan, sehingga menjadikan konservasi menjadi isu penting dalam pembangunan wilayah. Hal ini mewujudkan dalam potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana diatur dalam Perda No.8/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang secara garis besar mengatur tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Potensi pengembangan kawasan budidaya meliputi sektor pertanian, perikanan,

kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten yang terletak antara 0° 18' 21.6" - 0° 48' 21.96" lintang utara, dan 123° 2' 11.76" - 123° 33' 15.48" bujur timur ini memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum 35,4° C dan suhu minimum 19° C. Sedangkan curah hujan rata-rata pada tahun 2020 adalah 203,28 mm³.



Gambar 11. Profil Wilayah Kabupaten Bone Bolango

3.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango sebesar 162.780 jiwa, dengan angka harapan hidup 68,46 tahun. Terjadinya kenaikan angka harapan hidup dalam kurun 2017-2020 mengindikasikan adanya perbaikan dalam aksesibilitas layanan kesehatan. Namun yang patut menjadi perhatian adalah tren penurunan tingkat partisipasi kerja dan angka pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan ketimpangan

yang semakin melebar antara jumlah angkatan kerja yang tersedia dengan ketersediaan lapangan kerja.

Rincian/Description	Satuan/Unit	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	159,19	161,24	162,78
Laju Pertumbuhan Penduduk ² /Population Growth ²	%	1,39	1,28	1,34
Angka Harapan Hidup ^{3-e} /Life Expectancy Rate ³	tahun/years	67,95	68,38	68,46
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	99,32	98,93	99,70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3} <i>Labour Force Participation Rate-LFPR^{2,3}</i>	%	65,98	65,38	63,68
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² <i>Unemployment Rate-UR²</i>	%	4,30	4,35	4,48
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	ribu/thousand	27,61	25,91	25,72
Persentase Penduduk Miskin ⁴ <i>Percentage of Poor People⁴</i>	%	17,40	16,12	15,81
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ <i>Human Development Index⁵</i>	-	69,06	69,63	69,98
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Beraku ⁶ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price⁶</i>	miliar rupiah <i>billion rupiahs</i>	4 202,06	4 579,49	4 648,85
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%	6,46	6,35	0,06
PDRB Per Kapita Harga Beraku ^{6,8} <i>Per Capita of GRDP at Current Price^{6,8}</i>	juta rupiah <i>million rupiahs</i>	26,39	28,39	28,50
Catatan/Notes: ¹ Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni)/ <i>The result of Indonesia population projection 2010–2035 (mid year/June)</i>				
² Kondisi Agustus/Condition at August				
³ Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population projection				
⁴ Kondisi Maret/Condition at March				
⁵ Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita				
⁶ Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)				
⁷ Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100)				
⁸ Menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010/Using population projection based on SP2010				

Tabel 1. Profil Sosial Ekonomi Bone Bolango

Wilayah Bone Bolango sangat berdekatan dengan wilayah Kota Gorontalo sebagai pusat kegiatan nasional yang berdampak penting bagi perkembangan wilayah Bone Bolango. Dengan aksesibilitas yang tinggi tersebut, pengaruh pembangunan di wilayah Kota

Gorontalo memiliki pengaruh langsung bagi mobilitas ekonomi di Kabupaten Bone Bolango. Dari kacamata ekonomi makro, dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bone Bolango. Hal ini dapat kita lihat pada laju pertumbuhan ekonomi Bone Bolango tahun 2020 yang hanya berada di angka 0,06%. Sementara PDRB per kapita berada di kisaran 28,5 juta rupiah, namun hal ini belum dapat menggambarkan daya beli masyarakat secara riil, karena perhitungan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku belum memperhitungkan inflasi, selain itu faktor ketimpangan juga belum tergambarkan.

3.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah dalam keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Belanja daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran pada setiap program.

Dalam RPJMD 2016 - 2021, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.174.755.246.548,37. Artinya masih ada gap antara target dengan realisasi capaian per tahun anggaran 2019. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami tren peningkatan dalam rentang lima tahun terakhir, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2014 hingga 2019, angka pertumbuhannya selalu positif.

No	Uraian	LRA 2014	APBD 2019	Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun
1	PENDAPATAN	604.778.303.865,72	1.016.945.302.946,00	8,11%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.670.045.826,72	87.003.452.925,00	9,73%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.193.103.143,00	13.425.000.000,00	12,26%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	729.769.545,00	4.400.000.000,00	16,68%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	419.540.958,00	2.000.000.000,00	15,80%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.327.632.180,72	67.178.452.925,00	8,59%
1.2	DANA PERIMBANGAN	480.946.361.522,00	695.942.726.000,00	6,18%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	19.691.551.522,00	N/A	
1.2.2	Dana Transfer Umum	408.500.750.000,00	510.498.451.000,00	4,00%
1.2.3	Dana Transfer Khusus	52.754.060.000,00	185.444.275.000,00	14,31%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.161.896.517,00	233.999.124.021,00	13,23%
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	34.641.000.000,00	18,85%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.981.632.317,00	16.860.984.709,00	4,60%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.228.505.000,00	31.353.470.000,00	-16,51%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.325.424.700,00		
1.3.6	Pendapatan Lainnya	3.626.334.500,00	151.143.669.312,00	19,52%

Tabel 2.
Perbandingan
Pendapatan
LRA 2014 -
APBD 2019

Kebijakan belanja daerah untuk Periode 2016-2021 masih akan dititikberatkan pada lima pilar pembangunan, yakni pembangunan (1) pertanian dan peternakan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) infrastruktur dan perumahan; serta (5) pariwisata. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan pembangunan desa dalam upaya penguatan dan pendukung terwujudnya *Desa Tumbuh, Daerah Maju* dialokasikan melalui Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta sumber keuangan lainnya. Pemanfaatan dana desa di prioritaskan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar skala desa serta menunjang mobilitas ekonomi masyarakat.

Bolango tahun 2020 adalah 960,61 miliar rupiah, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 968,59 miliar rupiah. Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja senilai 950,79 miliar rupiah, maka diketahui bahwa realisasi pendapatan mempunyai nilai yang lebih besar.

3.1.4 Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- Agama yang paling banyak dianut masyarakat Bone Bolango adalah Islam sebanyak 162.472 penganut, kemudian berturut-turut 308 penganut Protestan, 22 Hindu, 15 Katolik, dan 9 Budha. Terdapat total sebanyak 337 tempat peribadatan yang tersebar di 18 Kecamatan.
- Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango juga mengalami penurunan yang pada tahun 2019, persentase penduduk miskin berjumlah 16,12, pada tahun 2020 turun menjadi 15,81.
- Dari proporsi penduduk angkatan kerja, diketahui bahwa jumlah penduduk bekerja adalah 72.459 jiwa dan jumlah penduduk yang menganggur adalah 3.389 jiwa

No	Uraian	LRA 2014	APBD 2019	Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun
2	BELANJA	571.770.370.417,80	1.043.952.321.277,32	9,05%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	319.825.803.536,00	546.164.303.252,24	8,29%
2.1.1	Belanja Pegawai	275.996.256.838,00	338.633.850.550,24	3,70%
2.1.2	Belanja Hibah	7.698.299.898,00	8.247.400.000,00	1,33%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	10.531.246.800,00	3.845.000.000,00	-34,78%
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Desa dan Parpol	25.600.000.000,00	195.188.052.702,00	17,38%
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	N/A	250.000.000,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	251.944.566.881,80	497.788.018.025,08	9,88%
2.2.1	Belanja Pegawai	39.985.878.284,00	69.869.913.600,00	8,55%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.346.995.224,80	212.071.994.908,76	11,48%
2.2.3	Belanja Modal	12.161.193.373,00	215.846.109.516,32	18,87%

Tabel 3. Perbandingan Alokasi Belanja LRA 2014 - APBD 2019 Pada tahun 2020, pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	48 909	26 948	75 857
1. Bekerja/ <i>Working</i>	46 625	25 834	72 459
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	2 284	1 114	3 398
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i>	10 480	32 777	43 257
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	3 849	6 105	9 954
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	2 833	24 064	26 897
3. Lainnya/ <i>Others</i>	3 798	2 608	6 406
Jumlah/<i>Total</i>	59 389	59 725	119 114

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Tabel 4. Perbandingan Angkatan Kerja vs Bukan Angkatan Kerja di kabupaten Bone Bolango

atau sebesar 4,47% jika dibandingkan dengan penduduk angkatan kerja.

- Pada tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango memiliki jumlah sekolah Sekolah Dasar sebanyak 133, dengan 15.523 murid dan 1.265 guru, sekolah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 41, dengan 6.317 murid dan 601 guru, sekolah Sekolah Menengah Atas sebanyak 9, dengan 4.180 murid dan 284 guru, sekolah Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 6, dengan 2.475 murid dan 235 guru, serta perguruan tinggi sebanyak 2.
- Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Bone Bolango adalah 2 rumah sakit umum, 20 puskesmas, dan 8 klinik atau balai kesehatan.

Indikator Pembangunan Manusia <i>Human Development Indicator</i>	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (Tahun) <i>Life Expectancy at Birth (Years)</i>	67,95	68,38	68,46
Harapan Lama Sekolah (Tahun) <i>Expected Years of Schooling (Years)</i>	13,44	13,45	13,57
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) <i>Means Years of Schooling (Years)</i>	8,04	8,07	8,31
Indeks Pembangunan Manusia <i>Human Development Index</i>	69,06	69,63	69,98
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp000) <i>Adjusted Expenditure per Capita (Rp000)</i>	9 827	10 147	10 052

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Bolango/Statistics of Bone Bolango Regency

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bone Bolango

- Pada tahun 2020, tercatat 39.842 pelanggan listrik PLN dan 5.841 pelanggan air bersih dengan volume air yang disalurkan sebesar 920.716 m³.
- Catatan sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango telah terjadi bencana alam yaitu 23 banjir, 48 gempa bumi, dan 4 tanah longsor.
- Jumlah kriminalitas terbesar pada tahun 2020 berturut-turut yaitu penganiayaan sebanyak 122 kasus, pencurian sebanyak 33 kasus, penghinaan sebanyak 22 kasus, Kekerasan Rumah Tangga sebanyak 18 kasus, dan pengancaman sebanyak 17 kasus.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2020 adalah 69,98. Terjadi peningkatan dari 2019 yang berjumlah 69,63.

3.1.5 Sektor Produksi Masyarakat

- Pada tahun 2020 Kabupaten Bone Bolango terdapat tanaman sayuran semusim diantaranya luas panen cabai rawit seluas 259 hektar dengan produksi 1.458,4 ton dan terdapat 33 hektar tomat dengan produksi 148,5 ton.
- Untuk tanaman buah-buahan, produksi di tahun 2020 secara berturut-turut yaitu pisang sebanyak 2.705,2 ton, pepaya sebanyak 1.060,1 ton, buah mangga sebanyak 272,8 ton, dan durian sebanyak 232,0 ton.
- Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2020 yang terbesar adalah 2.301,8 ton kelapa, kemudian 96,11 ton kakao dan 33,07 ton kopi.
- Pada tahun 2020 terdapat populasi ternak ayam kampung sebesar 324.491 ekor, ayam pedaging 215.360 ekor, ayam petelur 147.600 ekor dan itik sebesar 10.966 ekor.
- Kemudian ternak sapi sebesar 47.384 ekor, 7.064 ekor kambing dan 226 ekor kuda.
- Sementara untuk sektor perikanan, terjadi penurunan produktifitas dari semula sebesar 13.339,1 ton pada tahun 2019, menurun menjadi 12.560,8 ton pada tahun 2019.
- Pada sektor perikanan budidaya, terdapat 468 rumah tangga yang memiliki kolam budidaya dengan total luas kolam mencapai 165.194 m², 11 keluarga memiliki jaring tancap, dan 7 keluarga memiliki budidaya payau dengan kapasitas produksi 37,19 ton/tahun.
- Pada sektor perikanan tangkap, terdapat 1.664 keluarga yang aktivitas ekonominya pada perikanan tangkap laut, sementara tidak ada keluarga yang menggeluti perikanan tangkap darat sebagai aktivitas ekonomi utamanya.

- Data umum profil nelayan di Kabupaten Bone Bolango kami sajikan pada tabel di bawah ini.

Klasifikasi <i>Classification</i>	Jumlah Total
(1)	(2)
1. Jumlah Total Kartu Nelayan / Total of Fisherman's Cards	
a. Nelayan Laut / <i>Sea Fisherman</i>	2 606
b. Nelayan Perairan Umum Darat / <i>Inland Water Fisherman</i>	-
2. Kelompok Kepemilikan Kapal atau Perahu / Groups of Ship or Boat Ownership	
a. Pemilik / <i>Owners</i>	1 664
b. Pekerja / <i>Workers</i>	868
c. Pemilik dan Pekerja / <i>Owner and Worker (at the same time)</i>	74
3. Kelompok Ukuran Kapal atau Perahu / Groups of Ship or Boat Size	
a. Tanpa Perahu / <i>Without Boat or Ship</i>	-
b. < 10 GT	1818
c. 10 - 30 GT	25
d. > 30 GT	6
e. Tanpa Motor / <i>Boat Without Motor</i>	-
3. Kelompok Alat Tangkap / Groups of Fishing Gear	
a. Jaring / <i>Fishing Nets</i>	36
b. Pancing / <i>Fishing Rod</i>	1 517
c. Pukat / <i>Trawl</i>	-
d. Alat Lainnya / <i>Others</i>	296
3. Kelompok Pendapatan Nelayan / Groups of Fisherman's Income	
a. < Rp 500.000	161
b. Rp 500.000 - Rp 1.000.000	2 192
c. > Rp 1.000.000	253
3. Kelompok Pendidikan Nelayan / Groups of Fisherman's Education Level	
a. Tidak Tamat SD / <i>Ungraduated Elementary School</i>	675
b. Tamat SD / <i>Graduated Elementary School</i>	1 434
c. Tamat SLTP (sederajat) / <i>Graduated Junior Highschool (or Equivalent)</i>	328
d. Tamat SMA (sederajat) / <i>Graduated Senior Highschool (or Equivalent)</i>	162
e. Diploma dan Sekolah Tinggi (Sederajat) / <i>Diploma and College (or Equivalent)</i>	3
3. Kelompok Keluarga Nelayan / Groups of Fisherman's Family	
a. Keluarga Kecil (0 - 3) / <i>Small Family (0-3)</i>	983
b. Keluarga Sedang (4 - 6) / <i>Medium Family (4 - 6)</i>	1 464
c. Keluarga Besar (>6) / <i>Big Family (>6)</i>	

Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango /
Marine and Fishery Service of Bone Bolango Regency

Tabel 6. Profil Nelayan Tangkap Bone Bolango

- Sementara pada sektor industri yang diusahakan masyarakat pada tahun 2020, Industri terbesar secara berturut-turut adalah industri produk roti dan kue sebanyak 486 unit usaha, industri gula merah sebanyak 415 unit usaha, industri furnitur dari kayu sebanyak 313 unit usaha, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan sebanyak 267 unit usaha, dan industri kain sulaman/bordir 194 unit usaha.

3.2 Potret 5 Desa Lokus

Botubarani – Bondawuna – Botutonuo – Molutabu - Olele

Kami melakukan assessment lapangan di 5 desa sasaran program. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang berbagai dinamika yang terjadi. Kegiatan dilakukan dua hari di masing-masing desa dengan gambaran :

- Hari 1 : FGD assessment, pemahaman umum atas kondisi di desa
- Hari 2 : Pendalaman temuan-temuan menarik pada hari 1

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan FGD hanya dapat dilakukan di 3 desa, yakni Botubarani, Bondawuna, dan Olele. Sementara di Molutabu dan Botutonuo dilakukan full 2 hari dengan skema *door to door* stakeholder di desa. FGD tidak terlaksana karena jadwal yang direncanakan bertabrakan dengan penyelenggaraan Bimtek pemerintah desa dan terhambatnya komunikasi kami dengan pemerintah desa. Temuan - temuan kunci hasil *assessment* lapangan kami rangkum dalam poin-poin berikut.

3.2.1 Tata Kelola Desa

3.2.1.1 Aset Desa

- a. Kapasitas anggaran di kelima desa sasaran berkisar 1 – 1,3 Milyar, bersumber utama dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pengalokasian APBDes dalam dua tahun terakhir banyak tersedot dalam penanganan Covid-19. Jumlah penerima BLT-DD cukup mencengangkan, di setiap desa terdapat 180-230 keluarga penerima manfaat. Hal ini menyebabkan upaya-upaya pembangunan desa yang direncanakan sebelumnya terhambat karena refokusing anggaran.
- b. Bangunan – bangunan publik yang berdiri didapat dari hibah warga ataupun pembelian lahan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan aset tanah kas desa yang tidak berlaku di Bone Bolango. Adanya fasilitas publik diatas tanah menurut kepemilikannya, kecenderungan yang muncul adalah:
 - Tanah hibah : dari sisi emosional, pemberi hibah masih terikat atas tanah dan secara sosiologis masih memiliki kontrol atas pengembangan area tersebut.
 - Tanah pribadi yang dimanfaatkan untuk fasilitas publik: kecenderungan yang muncul, pemanfaatan atas tanah tersebut kental konflik kepentingan pribadi.
 - Tanah yang dialih kepemilikan : bisa dikatakan, skema ini paling aman. Kami belum melihat adanya resiko konflik dalam kasus ini.
- c. Penempatan institusi publik (desa) dalam barang/ aset publik (*common resources*) patut diperkuat sebagai upaya mencegah privatisasi sebagian pihak dan mitigasi konflik akibat kebermanfaatan yang tidak merata.

- d. Akses jalan desa yang belum kurang memadai menjadi hambatan aktivitas warga, umumnya mereka yang berada di perbukitan.

3.2.1.2 *Kultur Birokrasi dan Pemerintahan*

- a. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kurang berjalan prima. Hal ini dapat ditandai dengan sepihnya kantor desa pada hari kerja. Pemerintah desa yang ada umumnya memiliki kesibukan lain diluar tugasnya. Pun pemanfaatan teknologi (sistem informasi desa) untuk mempermudah pelayanan publik juga belum berjalan.
- b. Kami melihat adanya *distrust* antara masyarakat – pemerintah desa – pemerintah kabupaten. Dalam beberapa hal, upaya sinergitas peran dan *engagement* yang dilakukan belum menyentuh aspek *ownership* pada penerima program (masyarakat).
- c. Kapasitas pengaturan desa melalui penerbitan regulasi yang berdasarkan pada inisiatif lokal yang muncul baru penerbitan Perdes Pengaturan Ternak. Namun masih berdasarkan pada aspek kebersihan dan pengaturan wilayah. Dengan kuantitas ternak yang besar, sebenarnya cukup menjadi prasyarat pemampu desa masuk ke ruang strategis-ekonomis yang lebih luas.
- d. Kapasitas ekstraktif, yaitu kapasitas untuk memanfaatkan sekecil apapun peluang di desa baru terlihat di Kepala Desa Olele. Pembelian perahu tangkap yang selanjutnya dikelola Bumdes cukup berdampak pada terbukanya lapangan kerja yang luas. Pun beberapa program afirmatif lainnya dengan menysasar rumah tangga miskin digenjut.

- e. Kapasitas distributif, yaitu kapasitas pemerintah desa untuk mendistribusikan kewenangan desa melalui perluasan ruang-ruang partisipasi juga belum terlihat. Partisipasi umumnya masih dimaknai kehadiran fisik pada saat musyawarah, partisipasi dalam kontestasi, dan kerja bakti.
- f. Kapasitas pemerintah desa dalam merespons konflik sosial. Kisah berhentinya operasional wisata bukit tangga bale, disinyalir karena pembiaran dan kegagalan pemerintah desa dalam mediasi konflik antara kelompok pengelola wisata (karang taruna) dengan beberapa warga lainnya.
- g. Forum-forum diskusi publik (musdus – musdes – musrembangdes) belum berjalan inklusif. Penekanan terhadap kepentingan suatu kelompok dan unsur nepotisme kerap mewarnai pengambilan keputusan forum. Hal tersebut terkonfirmasi dalam beberapa pendalaman wawancara.

3.2.1.3 Relasi Kewargaan

- a. Pola relasi yang terbangun antara pemerintah desa dengan warganya baru sebatas pelayanan administratif, belum menyentuh aspek-aspek penyediaan dan pengaturan barang dan jasa publik. Belum banyak bentuk rekayasa sosial ataupun skenario-skenario programatik lainnya guna mengatasi masalah di desa serta jaminan ketersediaan layanan atas barang dan jasa publik. Kami baru melihat upaya pemerintah desa Olele dalam mengurangi jumlah rumah tangga miskin melalui serangkaian upaya programatik yang koheren melibatkan beberapa lini desa.
- b. Jaringan kolaborasi antara desa dan pihak diluar desa yang terbentuk antara lain:
 - Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se-Kecamatan Kabila Bone, organisasi yang dibentuk awal 2021 di-

latar belakang tuntutan regulasi. Kegiatan yang sudah terlaksana saat ini baru sebagai panitia penyelenggaraan pelatihan (bimtek). Inovasi akselerasi pemajuan desa belum nampak.

- Program afirmasi pemerintah, mayoritas isu desa wisata
 - Program CSR perusahaan. Umumnya masih dalam bentuk hibah barang/ fasilitas. BRI di Botutonuo, dan BI di Olele.
 - Kerjasama dengan universitas umumnya masih dalam rentang penempatan mahasiswa KKN. Yang menarik adalah adanya kelas bahasa asing di Botubarani hasil kerjasama pemerintah desa dengan UNG.
 - Beberapa inisiatif lain mandeg akibat refocusing pandemi, diantaranya program investasi kawasan pertanian di Bondawuna, dan kemitraan petani sereh wangi di Botutonuo dan Molutabu.
- c. Inovasi-inovasi yang muncul dari sebagian kelompok masyarakat umumnya belum termoderasi dalam skema pembangunan desa, sehingga inisiatif-inisiatif tersebut terhenti pada fase awal tumbuh.

3.2.1.4 Kelembagaan Desa

- a. **Bumdes** : Pemilihan usaha yang diajalkan Bumdes mayoritas tidak didasarkan pada analisa kelayakan usaha yang kuat. Bahkan usaha Bumdes hanya mampu menutup biaya operasional dan belum memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pengelolanya. Praktis hanya Bumdes Olele yang berkembang, memberikan peningkatan kesejahteraan bagi warga, hingga mamapu memberikan sumbangsih kepada

PADes (Rp 91.000.000,- pada 2020). Unit-unit usaha yang dijalankan Bumdes adalah:

- Botubarani = toko kelontong
 - Bondawuna = penjualan saprodi dan pengepul hasil panen
 - Botutonuo = penyediaan air bersih dan penyewaan alat pesta
 - Molutabu = pengelolaan pasar
 - Olele = perahu tangkap (pamo) berkapasitas medium-besar
- b. **Pokdarwis** : Kecenderungan hanya sebagai “bendera” untuk melindungi sumber daya yang ada dan sebagai pemenuhan legal untuk berhubungan dengan pihak lain (misal: akses bantuan). Kemampuan untuk membentuk kolektivitas juga kurang terlihat. Hanya Pokdarwis Botubarani yang memiliki forum rutin untuk membahas kerja kolektif dan membangun sinergitas dengan Pemdes dan stakeholder terkait lainnya.
- c. **Karang Taruna** : Kerja-kerja karang taruna mayoritas masih terfokus pada bidang olahraga. Munculnya beberapa inisiatif di kelompok kecil pemuda patut diapresiasi, diantaranya :
- Rahman Latedu (Bondawuna) → *Youtuber* dengan jumlah *subscriber* 74 ribu. Spesialisasi *mash up* lagu dan *composing* musik.
 - Rival Wartabone dan 6 pemuda (Botutonuo) → Inisiator Bukit Tangga Dua, yang kemudian mampu mempekerjakan 120 pemuda lainnya.
 - Jerry dan sekelompok pemuda (Olele) → Membangun *marketplace* desa.

- Karang Taruna Botubarani → Kepemilikan atas rakit, yang bersifat produktif untuk mengisi kas karang taruna.

Kesimpulan menariknya adalah, kemungkinan-kemungkinan mobilisasi pemuda untuk melakukan proyek bersama sangat dipengaruhi adanya sosok yang mampu menanamkan visi, dan kebersamaan proses bersama. Sumber – sumber ekonomi non eksploitatif dimungkinkan bekerja jika imajinasi terbentang luas.

- d. **PKK, Kader Kesehatan dan LMD** : kami tidak melihat aktivasi yang signifikan.

3.2.2 Pelayanan Publik

3.2.2.1 Pendidikan

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas cukup sering dilakukan pemerintah daerah. Namun pelatihan yang diadakan hampir kesemuanya bersifat vokasional, sehingga daya imajinasi dan kreativitas peserta latih kurang bertumbuh.
- b. Layanan terhadap pendidikan dasar sudah merata di desa. Dapat dikatakan 100% anak di 5 desa sasaran mengenyam pendidikan dasar. Namun kami menemukan fakta bahwa kecenderungan angka putus sekolah yang tinggi pada wilayah pemukiman yang memiliki keterputusan akses kendaraan. Sebagai contoh, sulitnya akses menuju dusun 4 Molutabu menyebabkan mayoritas anak disana putus sekolah selepas SD.
- c. Pendidikan non-formal bagi anak-anak praktis hanya pendidikan agama di masjid desa yang berlangsung setiap sore.
- d. Kami memotret fenomena *working class trap* membelenggu masyarakat subsisten yang rentan ekonomi. Pemuda usia 17 tahun (atau bahkan dibawahnya) terpaksa harus mem-

bantu, atau setidaknya mengurangi beban keluarga dengan melakukan aktivitas ekonomi produktif.

- e. Adanya fenomena diatas berimplikasi pada jerat waktu yang memacu mereka untuk terus bekerja, tanpa adanya proses diskursus serta *learning* yang menyertainya. Secara umum, hal ini juga mempengaruhi terbentuknya pribadi yang kurang eksploratif, imajinatif, dan inovatif untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru.

3.2.2.2 Kesehatan

- a. Layanan kesehatan dasar bisa dikatakan merata, tersedia layanan kesehatan pembantu tingkat desa.
- b. Pengetahuan warga terhadap pengobatan alternatif menjadi pilihan bagi sebagian warga yang memiliki keterbatasan akses. Pemanfaatan tanaman obat yang dijaga menjadi sumber pengobatan bagi mereka.
- c. Kami tidak menemukan isu/*concern* desa terhadap kematian ibu/ anak akibat persalinan, serta kasus stunting. Ini mengindikasikan kasus-kasus tersebut tidak terjadi/ terjadi dalam jumlah kecil di desa.
- d. Ketersediaan air bersih merata bagi seluruh warga. Pada saat kemarau berkepanjangan, sebagian warga mengalami kesulitan air bersih. Dalam kasus ini, BPBD kabupaten turun tangan untuk menyediakan air bersih bagi warga.

3.2.2.3 Lingkungan

- a. Ancaman musim hujan, limpahan sampah dari kota yang melewati teluk Tomini terbawa ombak hingga sampai di pesisir Kabila Bone.

- b. Isu persampahan dalam struktur kebijakan pembangunan desa belum terlihat selama proses *assessment*. Pun kapasitas sosial untuk mengelola sampah secara komunal juga belum ditemukan. Pengelolaan sampah rumah tangga umumnya dibakar. Kasus persampahan hanya kami temukan di Olele, tumpukan sampah di pantai disebabkan oleh kebiasaan warga yang membuang sampah di sungai yang alirannya menuju pantai.



Gambar 12. Aktivitas Ladang Berpindah
Memperbesar Pontensi Bencana Banjir dan Longsor

- c. Terjadi degradasi lingkungan disebabkan beberapa hal, yakni :
- Aktivitas pertambangan emas besar-besaran yang ada di hulu (kecamatan Suwawa Timur) dan sebagian lagi di desa Molutabu.
 - Aktivitas tambang galian C di Botubarani.

- Kebiasaan pertanian lahan berpindah, menyebabkan perambahan hutan dan memperbesar potensi bencana longsor.
- Desa yang memiliki kerawanan besar bencana longsor adalah Olele dan Bondawuna.
- Penggunaan pukut harimau dalam aktivitas nelayan tangkap. Alat ini biasa digunakan pada kapal yang berukuran relatif besar (pamo), sementara aktivitas ketinting menggunakan pancing dan jaring.



Gambar 13. Penggunaan Pukut Harimau Mengancam Kelestarian Ekosistem Laut

3.2.2.4 Ketenagakerjaan

- a. Ketersediaan lapangan kerja yang minim di desa menyebabkan banyak angkatan kerja baru masuk ke sektor pekerja informal di kota. Ini menyebabkan relasi kuasa yang melemahkan pekerja. Kami juga menandai keberadaan industri

- padat karya (misal: garmen dan manufaktur lainnya) yang minim di lingkup regional.
- b. Sektor industri kreatif dan perdagangan tidak bergerak di desa. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor utama, yakni:
 - Kemampuan inovasi, komodifikasi atas produk dan layanan yang belum memenuhi ekspektasi pasar, baik dari segi ragam dan kualitas produk/ layanan yang ditawarkan.
 - Daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan budaya “jajan” yang rendah. Ini dapat ditandai dengan kebiasaan “bawa bekal” ketika berwisata. Aktivitas perdagangan di tempat wisata dan beberapa tempat strategis (jalan trans) lesu.
 - Pengetahuan dan imajinasi terhadap sumber ekonomi baru yang masih sempit.
 - c. Pada sektor pertanian, terjadi keterputusan regenerasi petani karena pemuda cenderung memilih sektor lain sebagai aktivitas ekonominya. Sementara pada sektor perikanan tangkap, regenerasi cenderung aman.
 - d. Kami memotret fenomena *working class trap* membelenggu masyarakat subsisten yang rentan ekonomi. Pemuda usia 17 tahun (atau bahkan dibawahnya) terpaksa harus membantu, atau setidaknya mengurangi beban keluarga dengan melakukan aktivitas ekonomi produktif.
 - e. Adanya fenomena diatas berimplikasi pada jerat waktu yang memacu mereka untuk segera bekerja, tanpa adanya proses diskursus serta *learning* yang menyertainya. Secara umum, ini mempengaruhi terbentuknya pribadi yang kurang eksploratif, imajinatif, dan inovatif untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru (non alam).

3.2.3 Potret Sosial dan Ekonomi

3.2.3.1 Tinjauan Sosial dan Kebudayaan

- a. Secara umum, masyarakat Bone Bolango adalah masyarakat yang ramah dan terbuka terhadap pendatang. Mereka terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang sekiranya realistis dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis dan publisitas.
- b. Klaim privat atas penguasaan barang publik hingga menyebabkan terjadi degradasi nilai dan lingkup atas barang publik. Limitasi akses dan distribusi kebermanfaatan bagi masyarakat luas terhadap barang publik tidak merata.
- c. Ketimpangan akses ditandai dengan adanya kecemburuan sosial, yang disaat bersamaan individu-individu yang memiliki akses manfaat lebih membangun benteng resistensi. Beberapa pengalaman menjelaskan inisiatif dan intervensi yang berpotensi menggerus ruang ekonomi/ penguasaan atas sumber daya selalu mereka jegal.
- d. Kecenderungan yang muncul adalah status quo/ rational choice terhadap segala sesuatu yang dianggap kompetitor atau pembebanan. Dengan kondisi tersebut, disaat bersamaan sebenarnya kelompok tersebut memiliki limitasi karena basisnya kepentingan individual, bahkan ruang kolektif tidak muncul.
- e. Karena ruang kolektif gagal tumbuh membentuk kapasitas sosial, maka logika pengembangan nilai ekonomis atas usaha mereka cenderung mengharapkan bantuan dari pihak lain. Dengan situasi tersebut maka kebijakan dan anggaran pembangunan desa cenderung menjadi kontestasi kepentingan kelompok yang bila dikaji lebih jauh, eksistensi

kelompok ini sebenarnya jauh lebih sunyi dibandingkan eksistensi individu.

- f. Dengan kondisi-kondisi diatas, maka ekosistem inovasi dan pemberagaman gagal tumbuh.
- g. Terjadi pergeseran kebudayaan yang dapat ditandai dari beberapa hal, yakni :
 - Penggunaan bahasa ibu yang semakin tidak populer di kalangan muda. Yang paling kentara adalah literasi bahasa Bonda yang merupakan akar bahasa masyarakat Suwawa sudah tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari.
 - Kami tidak melihat permainan tradisional yang dimainkan anak-anak di 5 desa sasaran program.
 - Kenakalan remaja yang makin marak seperti minuman keras dan pergaulan bebas. Pun kontrol sosial terhadapnya sangat minim.
 - Beberapa ritual kebudayaan turun temurun masih terjaga, seperti penghormatan kematian, tradisi menjelang dan selepas lebaran, serta tradisi pembaiatan remaja putri.
- h. Pemekaran desa yang marak pada 2006 – 2008 juga menyempitkan relasi sosial yang terbangun. Pertikaian pemuda antar desa pun kerap terjadi.
- i. Sempitnya ruang ekonomi, keterputusan informasi dan rantai pasok menimbulkan egosentris individual atas penguasaan sumber daya. Penguasaan atas sektor-sektor strategis (umumnya wisata) hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat dan menyebabkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat.

3.2.3.2 *Aktivitas Ekonomi Warga*

- a. Kecenderungan perbedaan lingkungan pemukiman (darat dan pesisir) sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga.
- b. Mayoritas masyarakat pesisir merupakan keluarga nelayan subsisten dengan area tangkapan maksimal 3 mil laut. Hasil tangkapan nelayan umumnya cumi, ikan layang dan beragam jenis ikan kecil lain yang habitatnya di perairan dangkal. Penghasilan harian yang mereka peroleh antara Rp 50.000,00 – Rp 150.000,00. Namun kesejahteraan nelayan di Olele lebih baik daripada ketiga desa pesisir lainnya. Melimpahnya tuna dan daya jelajah tangkapan yang lebih luas menyebabkan produksi ikan di desa ini lebih banyak dibandingkan desa lainnya.
- c. Tantangan utama yang dihadapi nelayan adalah hukum pasar : saat tangkapan melimpah, harga cenderung menurun drastis. Usia produk ikan yang pendek juga menyebabkan nelayan tidak memiliki kuasa yang kuat terhadap pasar.
- d. Sementara untuk sektor darat, pertanian menjadi sektor pokok penggerak perekonomian warga. Bondawuna yang merupakan desa agraris, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, sementara sebagian warga lainnya sebagai penambang emas tradisional. Komoditas utama di desa ini adalah jagung, cabai dan kacang. Botutonuo dan Molotabu juga memiliki hamparan pertanian luas. Komoditas utama di desa ini adalah kemiri, dengan rata-rata hasil panen 500 kg/ minggu.
- e. Kendala utama di Bondawuna dan Molotabu adalah akses jalan menuju area pertanian (di bukit) yang sulit dijangkau. Umumnya warga menyewa ojeg atau kuli panggul untuk

mengangkut hasil panennya ke bawah. Ini menyebabkan kenaikan biaya produksi yang signifikan.

- f. Sebagian warga lainnya berprofesi sebagai pekerja migran di kota, yang umumnya menggeluti sektor informal. Kebanyakan kaum muda memilih mencari penghidupan di kota sebagai pilihan pertama.
- g. Perputaran uang di desa-desa sasaran sangat lambat. Bila merujuk dari data BPS tahun 2020 menyebutkan pengeluaran per kapita penduduk Bone Bolango per bulan berada di angka Rp.1.108.273,- dan tidak mengalami kenaikan signifikan dari data 2019 sebesar Rp.1.083.243,-
- h. Hal ini cukup miris bila disandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Gorontalo yang berada di angka Rp.2.586.900,-
- i. Daya beli masyarakat yang minim menyebabkan lesunya sektor jasa dan perdagangan. Karena kapasitas *demand* yang kecil, menyebabkan sektor ini hanya dimainkan sebagian kecil warga. Mayoritas warga masih berfokus pada sektor produksi sebagai pencaharian utama.

3.2.4 Geliat Pariwisata

3.2.4.1 Botubarani

- a. Wisata hiu paus ditemukan sejak 2016 dan mengalami puncak kejayaan pada dua taun awal dibuka. Pengelolaan wisata dilakukan oleh Pokdarwis.
- b. Tren kunjungan wisata yang terus menurun sejak 2017 hingga tahun ini. Tren kunjungan wisata yang menurun tersebut menurut hemat kami dipengaruhi dua hal, yakni :
 - Keberadaan hiu paus yang semakin sedikit

- Wisata hiu paus merupakan wisata pengalaman yang memiliki potensi *repeat order* yang rendah. Artinya orang yang pernah menikmati pengalaman tersebut, dan telah mengabadikannya dalam foto, tidak akan kembali lagi. Hanya sebagian kecil segmen minat khusus yang akan kembali.
- c. Segmen utama wisata ini adalah wisatawan luar daerah. Beberapa kecenderungan yang kami tangkap adalah :
- Keberadaan kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang menjadi tempat kunjungan kerja pemda lain di Provinsi Gorontalo, serta jaraknya yang relatif dekat dengan Botubarani.
 - Wisatawan asing yang berkunjung umumnya merupakan wisatawan transit yang menghabiskan waktu sembari menunggu jadwal keberangkatan kapal yang membawa mereka ke Pulau Togean, Sulteng.
 - Berada di Jalur Trans Sulawesi, mobilitas pelaku perjalanan sedikit banyak akan mampir menikmati wisata Botubarani.
 - Aktivitas ekonomi yang tumbuh adalah penyewaan perahu warga untuk menuju spot hiu paus, penyewaan *snorkle* dan alat selam. Namun warga menjadikan aktivitas ini sebagai mata pencaharian sekunder.
- d. Belum ditemukan upaya-upaya penguatan wisata sebagai bisnis dalam berbagai aspek rantai nilai. Keterlibatan warga dalam pengelolaan wisata sampai saat ini sebatas sebagai penerima tamu di lokasi yang dibawa oleh *guide* dari kota atau datang sendiri.



Gambar 14. FGD Assessment di Botubarani

3.2.4.2 Bondawuna

- a. Belum terdapat aktivitas wisata di desa ini, beberapa potensi yang patut dikembangkan sebagai tawaran paket wisata yang menarik adalah:
 - Bele Seni, rumah kuno warisan perjuangan Nani Wartabone
 - Batu Duanga, formasi tebing berbentuk perahu terbalik ditepi sungai Bone
 - Makam Auliya'
 - Pemanfaatan ruang runtuk edukasi pertanian terpadu
 - Wisata budaya → bahasa bonda, polopalo dan tarian
- b. Aktivasi event patut dipertimbangkan sebagai stimulus pengembangan wisata desa ini. Berkaca pengalaman pe-



Gambar 15. FGD Assessment di Bondawuna

nyelenggaraan lomba bola voli antar kampung yang digelar setiap tahun sejak 2017, bersamaan dengan peringatan HUT desa. Event yang digelar selama sebulan ini mampu menyedot atensi 20 kampung (lingkup kabupaten), dengan rata-rata pengunjung 2.000 orang per hari. Ini sekaligus membantah premis kurang strategisnya lokasi Bondawuna menyebabkan orang luar enggan berkunjung, sekaligus membentuk pondasi kolektivitas warga.

3.2.4.3 Botutonuo

- a. Wisata pantai Botutonuo mulai dikunjungi pada 2006. Sifat wisata pantai Botutonuo adalah *mass tourism* dengan pangsa utama keluarga dan muda-mudi. Bentuk wisata sejenis

sebenarnya juga ditawarkan pantai Kurenai dan pantai Molutabu, namun panjangnya garis pantai dan lokasi strategis Botutonuo menjadikan mereka sebagai *market leader* untuk segmen ini. Umumnya akan ramai pada akhir pekan, arus mobilisasi kendaraan dari kota menuju pesisir didominasi oleh pengunjung wisata.

- b. Jasa wisata yang ditawarkan antara lain penyewaan gazebo, perahu wisata, dan warung. Segala jasa wisata yang ditawarkan ini mutlak menjadi “*previledge* warga pesisir”. Meski ada beberapa celah legal pendirian gazebo di bibir pantai yang bermasalah. Privatisasi atas *common pool resources* menyebabkan perputaran ekonomi wisata hanya dapat dinikmati sebagian warga.
- c. Kecenderungan sekelompok warga yang menikmati kue wisata akan bersikap difensif-selektif terhadap upaya kolaboratif pengembangan wisata. Hal ini menjadi benteng yang menyulitkan pihak-pihak diluar mereka untuk masuk, termasuk pemerintah desa sekalipun.



Gambar 16. Diskusi Pra Assessment di Botutonuo

- d. Pada maret 2017, diinisiasi spot wisata Bukit Tangga Bali yang dibangun dan dikelola swadaya oleh sekelompok pemuda. Terjadi beberapa masalah yang menyertainya, diantaranya:
- Pada awal pembangunan, proyek ini dianggap sebagai *mission impossible*. Namun seiring berkembangnya waktu mampu menyedot atensi besar wisatawan, serta mampu merangkul 120 pemuda untuk terlibat mengelola.
 - Saat atensi wisata semakin besar, ada upaya kecemburuan dari penyedia jasa wisata pantai karena keberadaan spot ini dianggap sebagai kompetitor.
 - Hingga akhirnya langkah mereka terhenti 6 bulan pas-kan operasi karena adanya sengketa pemanfaatan lahan dengan pemilik lahan yang dilalui (trek) menuju puncak bukit yang gagal dimediasi oleh pemerintah desa, hingga kecamatan.

3.2.4.4 Molutabu

- a. Presentasi lanskap wisata pantai yang disajikan sama persis dengan Botutonuo. Wisata ini mulai dibuka pada 2012 dan mengalami kejayaan pada tiga tahun awal beroperasi.
- b. Kejayaan ini tidak terlepas dari adanya daya tarik wahana *banana boat* dan jetski, yang merupakan investasi pihak swasta yang bekerjasama dengan desa, dan dimoderasi oleh dinas pariwisata provinsi.
- c. Kerjasama ini berhenti pada 2015 dikarenakan beberapa hal, yakni:
 - Seringnya kerusakan alat, karena tergerus karang atau bersenggolan dengan perahu nelayan.

- Konflik dengan nelayan karena aktivitas wisata mengganggu aktivitas nelayan
 - Pada akhirnya investasi alat ditarik dan dialihkan ke Kabupaten Boalemo.
- d. Saat ini praktis wisata pantai Molutabu mengalami mati suri karena beberapa hal:
- Ketiadaan daya tarik wahana permainan
 - Kegagalan menemukan inovasi dan strategi diferensiasi, kalah bersaing dengan Botutonuo yang memiliki keunggulan lokasi lebih strategis.
 - Kegagalan melakukan komodifikasi paska ditariknya wahana permainan
- e. Pernah mencoba mengikuti jejak Botutonuo dengan menginisiasi wisata Bukit Cinta, namun respons pasar yang lesu menyebabkan wisata ini tutup.
- f. Pada 2018, Bumdes ingin mengaktifkan kembali wisata pantai. Melalui penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,- yang kemudian sebagian dibelanjakan untuk membeli beberapa becak air. Namun tidak direspons baik oleh pasar karena permainan ini hanya sesuai di perairan yang tenang.
- g. Terdapat potensi wisata air terjun dan gua yang didalamnya terdapat danau jernih, namun sulitnya akses menuju lokasi menjadi tantangan pengembangan wisata tersebut.
- h. Serangkaian proses diskusi menghasilkan ideasi “Wisata Pantai Privat”. Hal ini mengingat ceruk pasar sejenis belum diambil desa lain. Beberapa pengalaman kerjasama penyewaan pantai Molutabu oleh Polri, Bank dan Pemda untuk acara internal mereka, cukup menjadi pengungkit.



Gambar 17. Diskusi Pra Assessment di Molutabu

2.3.4.5 Olele

- a. Wisata unggulan Olele adalah pesona terumbu karang yang dapat dinikmati melalui aktivitas tur perahu kaca, snorkling, dan diving. Perairan Olele merupakan wilayah konservasi laut, sehingga tidak semua spot terumbu karang dapat diaktivasi wisata.
- b. Olele sebagai salah satu wisata unggulan Provinsi Gorontalo memiliki *coverage* promosi yang lebih masif dibandingkan wisata lain di Kabila Bone. Bentuk promosi yang ada diantaranya promosi di bandara, penamaan ruangan hotel yang melekat, dan kerjasama dengan *guide* dari kota. Selain itu, adanya ekspatriat yang menyediakan paket wisata juga turut mengangkat Olele ke mata dunia.
- c. Segmen utama wisata ini adalah wisatawan *middle high* yang berasal dari luar daerah. Beberapa kecenderungan yang kami tangkap adalah :



Gambar 18. FGD Assessment di Olele

- Keberadaan kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang menjadi tempat kunjungan kerja/ bisnis.
 - Wisatawan asing yang berkunjung umumnya merupakan wisatawan yang dibawa oleh ekspatriat penyedia paket wisata, atau mereka yang menunggu jadwal keberangkatan kapal ke Pulau Togean, Sulteng.
- d. Hampir sama dengan yang terjadi di Botutonuo, kecenderungan Pokdarwis hanya sebagai perangkat untuk melindungi sumber daya yang dikuasai sebagian masyarakat dan sebagai pemenuhan legal untuk mengakses beberapa program pemerintah. Aktivasi sebagai kelompok hanya terlihat saat ada program afirmatif masuk.
- e. Kue besar pariwisata hanya dinikmati 13 keluarga di Olele, sementara sebagian kecil warga lainnya turut kecipratan nilai ekonomis wisata sebagai penjual makanan atau tim perahu kaca.

- f. Kecemburuan sosial yang timbul menyebabkan sebagian warga mulai berfikir untuk mengaktifasi wisata darat. Ini dimaksudkan juga untuk menangkap pasar *middle low*. Beberapa ide yang muncul pada saat diskusi adalah *camping ground* dan bukit pandang.
- g. Selain cakupan kebermanfaatan yang sempit, masalah lain wisata di Olele adalah masalah sampah. Ini tidak terlepas dari kebiasaan warga yang membuang sampah di pantai dan sungai yang mengarah ke laut. Selain itu, banyaknya jumlah anak-anak di Olele yang membuang bungkus jajanan di sembarang tempat juga disinyalir sebagai penyebab.

3.2.5 Pengelolaan Usaha Berbasis Layanan Publik/Wisata Desa

3.2.5.1 Pokdarwis Botubarani -> Wisata Hiu Paus

- a. Pokdarwis membawahi kelompok, yang dibentuk berdasarkan pangkalan
- b. Terdapat pengaturan biaya dan operasional pelayanan, untuk layanan perahu, snorkeling, dan diving di spot lokasi hiu paus
- c. Biaya layanan untuk wisata dari atas perahu, terdiri dari biaya pemandu (pembawa perahu), pakan ikan (kepala udang), dan kas kelompok. 10% dari kas kelompok dialokasikan untuk desa. Biaya layanan untuk snorkeling dan diving, terdiri dari sewa alat dan sewa tempat.
- d. Terdapat souvenir di sekitar lokasi wisata yang diproduksi warga, sistem penjualan titip di warung sekitar pangkalan. Namun masih sangat terbatas baik dari ragam maupun jumlah. Kinerja penjualan souvenir sejauh ini tidak signifikan.

3.2.5.2 Bumdes Bondawuna -> Pertanian

- a. Bumdes menjual bibit, peralatan tani, pupuk dan obat pertanian kepada petani
- b. Bumdes membeli hasil panen petani, lalu menyalurkannya ke pasar yang ada di kota.
- c. Bumdes dapat memberikan “utang” bagi petani mulai dari pembibitan hingga perawatan kepada petani, dengan perjanjian hasil panen yang ada akan dibeli Bumdes di kemudian hari.
- d. Meskipun proses bisnis yang dijalankan sama persis dengan yang dijalankan tengkulak. Harga beli atas panen petani yang ditawarkan Bumdes sedikit lebih rendah daripada yang ditawarkan tengkulak. Sehingga petani lebih memilih menjual hasil panen kepada tengkulak.
- e. Pendapatan yang didapat baru dapat menutupi biaya operasional.

3.2.5.3 Bumdes Botutonuo -> Penyediaan Air Bersih dan Penyewaan Alat Pesta

- a. Bumdes melayani ketersediaan air bersih bagi 70 KK di Botutonuo, dengan omzet rata-rata Rp.1.200.000,-/ bulan.
- b. Tarif yang digunakan adalah Rp.1.000,-/M³, ditambah biaya beban. Kompetitor usaha ini adalah PDAM dengan tarif flat Rp.50.000,-/ bulan.
- c. Sementara untuk penyewaan alat pesta, sejauh ini baru melayani pasar lokal desa. Margin yang didapat cukup tipis. Kelayakan usaha ini patut dipertanyakan karena modal awal yang diinvestasikan relatif besar.
- d. Tantangan utama saat ini adalah besaran insentif pengurus. Strategi diferensiasi layak dipertimbangkan.

- e. Bumdes sedang mengajukan ide usaha penyediaan air galon kepada pemerintah desa, namun keterbatasan anggaran menjadi hambatan. Pun ide usaha ini patut dikaji ulang mengingat banyaknya kompetitor yang eksis. Di Botutonuo sendiri sudah ada 3 warga yang memiliki usaha penyediaan air galon.

3.2.5.4 Bumdes Molutabu -> Pengelolaan Pasar

- a. Pasar Molutabu merupakan satu-satunya pasar di Kabila Bone, yang buka setiap hari sabtu jam 05.00-12.00.
- b. Layanan yang ditawarkan Bumdes dalam usaha ini adalah penyewaan kios/ los (termasuk jasa kebersihan) dan jasa parkir. Pendapatan mingguan yang didapat berkisar Rp.600.000,- sampai Rp.1.000.000,-
- c. Upaya inovasi dilakukan dengan mengidentifikasi pola belanja masyarakat, sehingga pengembangan usaha Bumdes dirancang.

3.2.5.5 Bumdes Olele -> Kapal Penangkap Ikan

- a. Latar belakang pemilihan usaha ini adalah *concern* pemerintah desa Olele terhadap tingginya angka rumah tangga miskin (RTM) yang mencapai 242 KK.
- b. Unit usaha ini mulai beroperasi pada 2020. Infrastruktur kapal dan sarana pelengkapya diadakan melalui skema multipel dua tahun anggaran (2019 dan 2020) dengan total investasi mencapai Rp.800.000.000,-
- c. Kapal penangkap ikan ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 25 kru kapal dan 3 pengurus inti Bumdes yang seluruhnya berasal dari Olele. Adanya kapal ini juga berdampak ekonomis bagi 12 pemilik rakit (instalasi yang

dibuat untuk ikan berkumpul), jua beberapa pihak lain yang mendapat dampak tidak langsung akibat tambahan produksi ikan yang signifikan.

- d. Sehingga adanya unit usaha yang dijalankan Bumdes mampu membantu kerja pemerintah desa dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- e. Setelah dikurangi biaya operasional, hasil tangkapan ikan yang didapat (harian), maka skema bagi hasil yang disepakati adalah :
 - 33,3% untuk Bumdes
 - 33,3% untuk dibagi kepada kru kapal
 - 33,3% untuk pemilik rakit
- f. Dari hasil diskusi yang dilakukan, kami mengusulkan adanya skema tabungan nelayan. Ini dimaksudkan agar nelayan memiliki alat produksi secara mandiri di masa depan, serta adanya jaminan hari tua yang layak mengingat umur produktif nelayan terbatas.

IV

Dinamika Tata Kelola Sumberdaya Desa

Pemetaan karakteristik lima desa yang menjadi lokus kajian ini diawali dengan melakukan pemetaan ragam sektor utama yang menjadi sumber matapencaharian ekonomi warga melalui pembacaan rantai pasok dari aktivitas ekonomi yang ada. Rantai pasok digunakan sebagai pintu masuk untuk menjelajahi berbagai persoalan dan peluang pengembangan dari aspek kapasitas ekonomi, sosial, dan politik-pemerintahan dari pengelolaan sumberdaya yang ada di desa yang melibatkan relasi berbagai aktor baik pemerintah desa dan supra desa, asosiasi/kelompok warga/lembaga kemasyarakatan, pelaku ekonomi privat, maupun warga desa umumnya.

4.1 Rantai Pasok Bisnis Pengelolaan SDA Desa

Selain Bondawuna yang berciri kawasan perbukitan, keempat desa yang lain berada di kawasan pesisir laut selatan Kabupaten Bone Bolango. Selain sumberdaya kelautan, sebagian kawasan

desa pesisir juga berupa perbukitan. Ciri paling menonjol dari aktivitas ekonomi warga umumnya bergantung pada sektor ekstraktif SDA (perikanan tangkap dan pertambangan), dan sebagian lainnya mengupayakan sektor budidaya pertanian dan perkebunan. Sebagian kecil usaha ekonomi warga bergerak di sektor perdagangan barang dan jasa. Sektor pariwisata yang tumbuh juga sangat bergantung dengan potensi SDA, khususnya wisata pantai dan laut.

4.1.1 Sumberdaya Kelautan: Perikanan Tangkap

Sumberdaya kelautan diaktivasi warga melalui sektor perikanan tangkap dan pemanfaatan sebagian lanskap geografis untuk sektor pariwisata. Pada sektor perikanan tangkap, karakteristik usaha ekonomi warga cenderung berciri subsisten dengan mengandalkan ketinting dan alat tangkap tradisional. Jalur penyerapan hasil tangkapan nelayan relatif tidak terkendala dengan ketersediaan TPI dan jalur hubungan ke pedagang pengumpul dan pengecer dari Kota Gorontalo, didukung oleh sarana perhubungan darat yang sudah baik.



Gambar 19.
Aktivitas TPI
Huangobotu,
Kabila Bone

Subsistensi nelayan terkondisikan oleh keterbatasan sarana kapal, alat tangkap, dan sarana penarik/ pengumpul ikan (rakit) yang khas dalam karakteristik lautan berpaling. Konsekuensinya, jarak operasi tangkapan nelayan ketinting terbatas, belum lagi hambatan melaut saat musim ombak angin timur yang berlangsung sampai tiga bulan. Saat musim angin timur, warga beralih pekerjaan dengan masuk ke sektor nonformal atau informal lainnya di desa maupun ke Kota Gorontalo. Salah satunya adalah menambang di lokasi galian C yang ada di desa.

Sebagian warga mengusahakan sarana pamo yang mengatasi keterbatasan jarak tangkap dan alat tangkap dari ketinting. Pamo umumnya menggunakan jaring pukat sebagai alat tangkap. Pemilik pamo berasal dari warga dari desa lain atau pihak lain yang berinvestasi di sektor perikanan tangkap. Harga dan operasional pamo yang relatif tinggi, termasuk menampung sekitar 30 orang sebagai ABK yang diambil dari warga desa. Saat ini hanya BUMDes dari Desa Olele yang mengambil kesempatan untuk mengusahakan perikanan tangkap melalui pamo. Komoditas tangkapan pamo relatif



Gambar 20.
Aktivitas
Bongkar Ikan
Diatas Pamo

lebih beragam dalam jumlah yang lebih besar, termasuk menysar ke perairan laut di kabupaten tetangga.

Ikan-ikan jenis spesifik seperti kerapu atau kakap merah, yang beredar di pasaran umumnya didapatkan melalui pamo yang dijual dalam pasar khusus pada pengepul tertentu. Komoditas spesifik lainnya adalah tuna yang sangat berlimpah pada musim tertentu. Hasil tuna dalam skala besar ditampung oleh pabrik yang selanjutnya melakukan pengolahan terbatas dalam bentuk fillet untuk selanjutnya masuk ke pasar domestik dan ekspor. Pengolahan terbatas dalam bentuk fillet juga dilakukan oleh hasil tangkapan nelayan di Desa Olele melalui sebagian pengepul yang ada di desa.

Gagasan pengembangan perikanan tangkap di kawasan pesisir coba ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui rencana pengembangan kawasan agro-minapolitan yang dimuat dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri (RIPI) Kabupaten Bone Bolango. Sejauh ini daya dukung untuk perikanan tangkap dalam skala pabrikan baru tersedia dalam bentuk pabrik penampung untuk komoditas tuna (tahun-tahun sebelumnya pernah dalam komoditas udang) dan pabrik es yang ada di kecamatan tetangga (Bone Pantai). Pabrik es umumnya diakses oleh pamo yang membutuhkan bahan pendingin dalam jumlah besar. Pada nelayan ketinting, kebutuhan es pendingin hasil tangkapan sangat kecil dan sudah terpenuhi oleh mesin pendingin skala rumah tangga.

4.1.2 Sumberdaya Perbukitan dan Daratan: Pertanian, Perkebunan, Peternakan

Selain Botubarani, pengelolaan sektor daratan dengan lanskap perbukitan untuk pertanian dan perkebunan diusahakan oleh empat desa lainnya.

4.1.2.1 Pertanian Budidaya

Sektor pertanian berciri budidaya pada lahan kering yang sebagian besar untuk komodiitas tanaman jagung dan cabai (rica). Pertanian dilakukan pada lahan lereng-lereng bukit, dan masih banyak yang menggunakan metode ladang berpindah. Ladang berpindah dipilih karena praktis tidak ada teknik pengolahan lahan/tanah yang dilakukan oleh petani untuk menjaga atau meningkatkan kesuburan tanah.

Teknik bertani relatif sederhana, minim sentuhan pengelolaan/perawatan. Pengetahuan teknik bertani alami/organik yang jamaknya ditopang oleh warisan pengetahuan bertani antargenerasi hampir tidak terlihat. Sektor pertanian hanya berjalan begitu saja, sebagai proses menanam dan memanen.

Penyediaan benih diambil dari hasil panen sebelumnya. Pemahaman soal kualitas seleksi benih terkadang berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan dan hasil tanaman. Teknik budidaya dalam perawatan dan pengendalian hama tanaman dalam khasanah pengetahuan pertanian alami/organik juga tidak muncul. Dalam situasi ini, jejak penetrasi teknis revolusi hijau cenderung muncul dalam penggunaan berbagai bahan pestisida kimiawi untuk pembasmi rumput dan hama tanaman. Pembasmi rumput umumnya



Gambar
21. Lahan
Pertanian
Umumnya
Berada di
Perbukitan

digunakan untuk petani jagung saat awal proses penanaman sampai menjaga bibit cukup kuat. Berbagai bahan alam yang dapat digunakan untuk pemupukan dan pestisida secara organik praktis belum disentuh.

Komoditas pertanian budidaya yang utama adalah jagung dan cabai. Varietas jagung yang dikembangkan umumnya adalah varietas hibrida. Varietas jagung lokal, yang banyak diceritakan sebagai bahan pembuatan kuliner tradisional milu siram, kurang/ tidak ditemui pada petani di empat desa. Sedangkan untuk cabai, varietas yang dipilih umumnya adalah cabe rawit. Konsumsi cabai di daerah kawasan Gorontalo relatif besar mengingat kebiasaan makanan pedas pada berbagai masakan lokal.

Rantai pasok hasil panen jagung berbeda antara desa di pesisir dan perbukitan (Bondawuna). Pada petani di 3 (tiga) desa pesisir, Botutonuo, Molutabu, dan Olele, kebebasan petani untuk menjual hasil panennya relatif terbuka. Petani jagung di Olele tidak sebanyak di dua desa tetangganya. Jalur informasi terhadap perkembangan harga di tingkat penampung akhir dari produk jagung (gudang dan kandang peternakan) relatif bisa diakses sehingga petani relatif memiliki daya tawar harga yang baik saat berhubungan dengan pengepul. Pertimbangan kesepakatan harga makin lebih bisa didekatkan sampai pada batas tingkat kesulitan/ biaya pengangkutan (biaya logistik) hasil panen. Selain itu, petani di tiga desa ini juga tidak memiliki jebakan keterikatan dengan pengepul tertentu yang “mewajibkan” untuk hanya menjual hasil ke salah satu pihak.

Berkebalikan dengan situasi independensi petani di tiga desa pesisir, tingkat ketergantungan yang tinggi masih menjadi kendala petani di Boundawuna. Petani di Boundawuna umumnya “terjerat” dengan permodalan sektor pertanian sehingga menjalin kerjasama

pembiayaan dengan para pengepul di desa. Petani umumnya meminjam sejumlah uang, benih/bibit, atau berupa sarana produksi pertanian lainnya yang digunakan untuk mengawali proses tanam. Sebagian uang pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani sampai dengan masa panen tiba. Saat panen, hasil disetor/dijual ke pengepul yang memberikan modal, dihitung nilainya, dan dikurangi pinjaman yang telah diambil. Harga berada dalam kendali pengepul, tidak ada ruang negosiasi harga yang memadai. Siklus semacam ini terus berputar, membuat petani sulit keluar dari jebakan ketergantungan. Intervensi untuk mengubah situasi ini telah coba dilakukan oleh BUMDes dengan memasuki model bisnis yang sama. Namun demikian, dalam penilaian petani, tawaran harga dan layanan yang disediakan oleh BUMDes tidak sebaik yang telah disediakan pengepul di desa.

Selain persoalan ketergantungan pada kasus Bondawuna, inefisiensi nilai dari komoditas pertanian juga dipengaruhi signifikan oleh biaya logistik, terkait mobilitas barang hasil panen dari lahan pertanian ke jalan utama desa. Mahalnya biaya logistik ditemui untuk Bondawuna dan Molutabu. Di Botutonuo, meski lahan pertanian ada di perbukitan, akses jalan masuk untuk kendaraan roda empat (mobil pick-up) masih bisa tembus, meski masih berupa jalan tanah dan butuh kehati-hatian saat jalan basah atau musim penghujan. Pilihan mobilitas barang selanjutnya diangkut secara manual atau menggunakan ojek motor dengan medan ekstrem.

Pengolahan lebih lanjut pada komoditas jagung dan cabai tidak dilakukan mengingat serapan pasar untuk bahan baku sudah mencukupi. Hasil panen jagung telah terserap habis untuk dikirim ke gudang dan kandang untuk kebutuhan pakan ternak. Penjualan jagung dalam bentuk jagung pipil dengan pengeringan manual menggunakan sinar matahari dan pemipilan melalui me-

sin perontok jagung yang dimiliki kelompok tani. Jagung tidak menjadi komoditas pangan pokok, kecuali pada momen-momen tertentu. Komoditas pangan utama beralih ke beras. Sedangkan komoditas cabai, relatif berada dalam pasar terbuka yang rentan terhadap perubahan harga, persis seperti yang terjadi dengan komoditas ini di berbagai daerah lainnya. Dinamika harga cabai umumnya bergerak secara mingguan, mengikuti dinamika harga pasar lokal di Molutabu (Pasar Sabtu).

4.1.2.2 Perkebunan

Komoditas perkebunan umumnya berasal dari tanaman yang tumbuh alami/terlah ada sebelumnya atau memanfaatkan hasil penanaman tanaman perkebunan yang sebelumnya pernah difasilitasi pemerintah. Komoditas rutin adalah tanaman pisang dan kelapa, yang meski tidak dalam jumlah besar namun relatif rutin dipanen. Komoditas pisang dijual tanpa pengolahan lebih lanjut. Komoditas kelapa diolah dalam bentuk kopra sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa. Minyak kelapa (minyak kelapa kampung) umumnya diproduksi untuk konsumsi sendiri atau diedarkan dalam skala terbatas dan lokal.

Komoditas perkebunan paling terlihat menghasilkan dan memberikan pendapatan signifikan kepada petani adalah kemiri. Kemiri awalnya bukan tanaman endemik di kawasan perbukitan desa pesisir, namun pernah dilakukan program penanaman massal (reboisasi) pada lahan-lahan yang menghubungkan dengan kawasan hutan. Hasil kemiri jamak ditemukan di Botutonuo dan Molutabu yang dijual dalam bentuk telah pecah kulit. Pengeringan dan pemecahan kulit dilakukan secara manual dengan sinar matahari dan alat sederhana. Mesin pecah kemiri kulit kemiri belum tersedia.

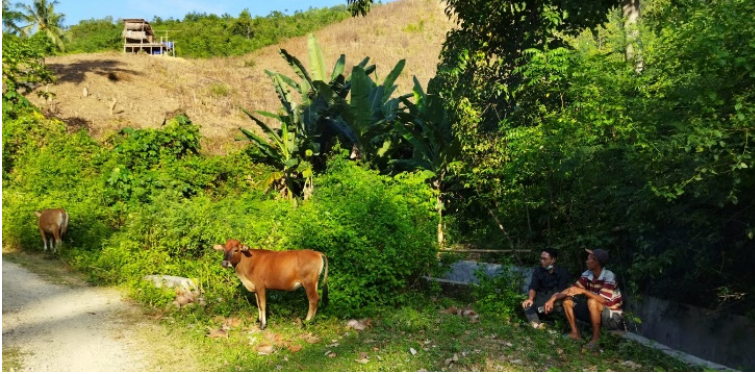
Komoditas kemiri relatif bisa diandalkan sebagai tanaman hasil tahunan (panen raya), dan umumnya satu kali panen sela. Buah kemiri dipanen dengan memungut buah tua yang telah jatuh ke tanah. Jumlah tanaman, hasil, dan area yang luas dari tanaman kemiri membuat pemanenan tidak cukup jika hanya dikerjakan oleh petani pemilik tanaman. Sistem bagi hasil panen dengan memperbantukan tenaga kerja saat musim panen sudah dilakukan dengan proporsi 1:1, meskipun cara ini juga masih belum menuntaskan jumlah potensi panen yang ada.

Hasil kemiri dapat bertahan lama. Jalur distribusi rantai pasok kemiri praktis tidak dipahami petani, sehingga relatif menerima penawaran harga dari pengepul. Pengepul menjemput hasil kemiri dan hasil perkebunan lainnya seperti kopra dari petani di lokasi dusun atau melalui Pasar Sabtu yang ada di Molutabu.

4.1.2.3 *Peternakan*

Peternakan belum ditekuni sebagai sumber pencaharian warga. Konsep pengelolaan sektor peternakan pada komoditas sapi dan kambing lebih dimengerti sebagai tabungan rumah tangga yang akan dicairkan pada momen tertentu, seperti acara hajatan atau idul qurban. Kondisi ini membuat pengelolaan ternak relatif tanpa pemeliharaan, dilepas untuk mencari pakan sendiri. Beberapa intervensi teknis lebih terlihat dari pemanfaatan (termasuk sukarela) asupan program dari pemerintah supra desa untuk inseminasi buatan. Skala usaha peternakan praktis berbasis rumah tangga tanpa pemeliharaan signifikan. Sapi dan kambing hanya dilepas liar.

Sejauh ini isu hewan ternak baru sebatas didekati para pihak dari sisi ketertiban, termasuk oleh pemerintah desa. Pelepasan hewan ternak secara liar telah berakibat rusaknya sebagian tanaman warga, termasuk tanaman produktif, serta mengotori



Gambar 22. Warga Menggembala Ternak Sembari Cek Kebun

kebersihan lingkungan. Berpijak dari sini, pendekatan ketertiban dilakukan dengan mengeluarkan peraturan desa yang melarang pemiliknya membiarkan hewan ternak berkeliaran. Peraturan ini diterapkan oleh kelima desa, meski dengan efektivitas pelaksanaan yang berbeda-beda.

Sebagian pemilik ternak umumnya memilih mengandangkan ternaknya di satu area lahan pekarangan di dekat rumahnya agar mudah dipantau. Sebagian lainnya, khususnya di Olele, akhirnya menerima kebijakan desa untuk mengandangkan ternak yang berkeliaran di satu area khusus. Pemeliharaan selanjutnya diserahkan ke pemilik masing-masing.

Pendekatan sumberdaya peternakan belum dioptimalkan sebagai komoditas ekonomi. Jumlah ternak liar yang dihimpun dalam satu kawasan di Olele terbilang besar. Jumlah sapi diperkirakan lebih dari 200 ekor, jumlah yang relatif memadai untuk dikelola secara bisnis. Namun demikian, gagasan dan arah kebijakan ke arah tersebut memang belum terlihat., baik dari sisi inisiatif warga, pemerintah desa, maupun Bumdes.

4.1.2.4 Pertambangan

Karakteristik aktivitas pertambangan umumnya berciri pertambangan rakyat, baik galian C maupun bahan mineral. Pertambangan bahan mineral sebagian menggunakan area eks perusahaan atau sekitar lokasi operasi penambangan perusahaan yang masih eksis. Bahan alam yang ditambang berupabatu/pasir gunung, emas, dan batu hitam. Lokasi pertambangan emas di Bone Bolango cukup banyak dan menjadi daya tarik ekonomi warga dari banyak desa, termasuk pendatang dari luar daerah. Pada kelima desa ini, lokasi pertambangan yang ada dalam wilayah teritori Molutabu, meskipun warga juga menambang di lokasi-lokasi lainnya.

Warga penambang umumnya berada di lokasi tambang selama kisaran waktu 2 (dua) minggu, menyesuaikan ketersediaan bahan kimia yang digunakan untuk memproses hasil tambang. Warga kembali ke desa sambil menunggu untuk bisa mendapatkan bahan kimia yang dibeli dari salah satu *supplier* di Kota Gorontalo. Bekerja di sektor tambang rakyat terbilang berat, beresiko tinggi, dan butuh keberanian ekstra. Namun, sektor ini dipilih sebagai cara untuk segera bisa mendapatkan penghasilan, bisa masuk tanpa harus membutuhkan skill khusus, sambil berharap mendapatkan keberuntungan hasil. Jika hasil bagus, nilai yang didapatkan cukup menggiurkan. Umumnya para penambang bekerja secara berkelompok, bergantian peran dan jam kerja. Hasil dibagi bersama, dengan persentase tertentu diberikan kepada pemilik lahan (lobang untuk menambang dalam tanah).

Pemilik lobang relatif diuntungkan dari proses ini, terlebih jika memiliki beberapa lobang yang masih produktif. Pemilik lobang bisa memiliki beberapa lobang tambang yang selanjutnya dikerjasamakan dengan kelompok penambang. Meski mendapat pembagian hasil terbesar, pemilik lobang di awal bertanggungja-

wab menyediakan bahan dan peralatan, serta menyediakan pinjaman uang untuk modal operasional para penambang. Sebagian pemilik lobang di pertambangan di area Molutabu adalah warga desa setempat.

Laiknya pertambangan rakyat, pengelolaan sektor lingkungan relatif terabaikan. Aktivitas pertambangan diduga berkontribusi terhadap tingkat pencemaran air sungai dan degradasi kualitas lingkungan lainnya. Kebijakan pengendalian resiko kerusakan lingkungan sejauh ini belum sebanding dengan kemendesakan warga untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan. Pilihan ruang ekonomi memang belum banyak tereksplorasi dan terfasilitasi. Sektor ekstraktif di pertambangan (dan kelautan) banyak menjadi pilihan mudah untuk segera masuk ke dunia kerja, terutama bagi kelompok laki-laki berusia muda.

4.1.3 Pariwisata Berbasis SDA

Sektor pariwisata di desa tumbuh paling belakangan. Selain Bondawuna, keempat desa di pesisir adalah destinasi wisata dengan basis sumberdaya pantai dan laut. Meski telah dimasukkan sebagai bagian kawasan desa wisata, Bondawuna masih dalam tahap rintisan untuk memetakan sumberdaya pariwisatanya. Pada keempat desa pesisir, aktivitas wisata masih berjalan sampai saat ini, kecuali Molutabu yang mati suri. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik wisata pantai dan laut yang ada umumnya menysasar wisatawan lokal dan domestik, kecuali sebagian untuk Olele yang menawarkan wisata bawah laut. Wisatawan lokal umumnya akan sangat banyak berwisata di akhir minggu. Sedangkan wisatawan domestik terlihat terhubung dengan posisi Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi yang banyak menjadi kunjungan kerja dari daerah sekitar.



Gambar 23. Kalender Musim Hiu Paus di Botubarani

Karakteristik kemunculan pariwisata berbasis pantai dan laut umumnya ditemukan “secara insidental” dari aktivitas wisatawan lokal yang datang berkunjung. Kemunculan kawasan (spot) wisata umumnya memang tidak direncanakan, namun secara organik tumbuh karena muncul wisatawan lokal yang datang berkunjung. Peluang ini secara bertahap kemudian direspon oleh warga dengan menyiapkan berbagai kelengkapan yang mendukung kelengkapan dasar layanan wisatawan, seperti tempat duduk (gazebo), ruang bilas, warung kelontong, layanan wisata naik perahu, dan ornamen-ornamen kecil di sekitar lokasi. Karakteristik ini muncul di Botutonuo dan Molutabu yang praktis memiliki lanskap yang mirip dengan layanan yang serupa. Botutonuo masih eksis saat ini karena lokasinya yang juga lebih dekat dari arah Kota Gorontalo. Molutabu yang pernah eksis terutama karena



Gambar 24. Aktivitas Perahu Kaca di Olele

menyediakan layanan wisata atraksi laut (banana boat dan jetski) kini tidak lagi aktif setelah layanan ini tidak ada lagi.

Layanan wisata di Olele agak berbeda. Wisata bawah laut didekati dengan layanan perahu yang dilengkapi dengan kaca transparan untuk melihat keindahan bawah laut. Selain itu, layanan spot diving juga tersedia untuk mengantar wisatawan ke beberapa spot diving yang ada. Sama dengan kasus desa lainnya, kemunculan wisata di Olele juga hasil dari proses insidental karena aktivitas penelitian bawah laut oleh beberapa peneliti, termasuk warga asing, yang memetakan keindahan bawah laut Olele. Salah satu peneliti yang menjadi pemrakarsa wisata juga berasal dari seorang warga asing (warga AS) yang selanjutnya mempromosikan Olele sebagai destinasi wisata ke wisatawan mancanegara. Hasilnya, Olele umumnya dikunjungi wisatawan manca yang tengah transit di Gorontalo sebelum menuju wisata laut di destinasi kepulauan (Togean, Sulteng). Pembelajaran warga olele dalam pengelolaan wisata praktis dimulai dari sini, termasuk memulai dengan bekerja sebagai pegawai/pemandu di layanan jasa wisata yang disediakan oleh warga AS tersebut.

Layanan kepariwisataan lainnya di luar spot relatif masih terbatas. Tidak banyak layanan pendukung yang tersedia baik dari warung makan, penginapan, tempat berbelanja dan sebagainya. Ini menegaskan karakteristik wisata yang ada memang masih banyak bertumpu pada wisatawan lokal.

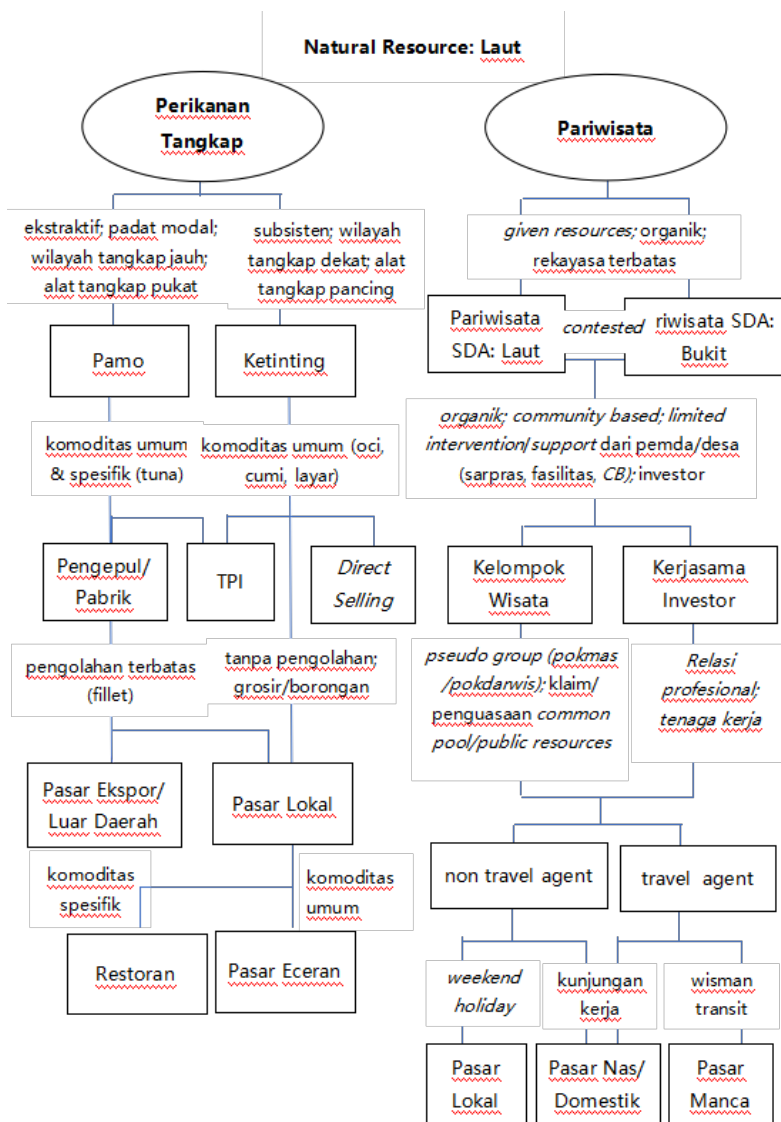
Pariwisata, sungguhpun telah menghasilkan, masih belum menjadi pencaharian utama. Sektor nelayan masih lebih digeluti untuk pencaharian sehari-hari. Kondisi ini muncul baik di Botubarani yang menawarkan wisata hiu paus, wisata pinggir pantai di Botutonuo, maupun wisata bawah laut di Olele. Dari ketiga desa tersebut, Botutonuo punya cerita kemanfaatan ekonomi wisata yang lebih panjang karena memang eksis lebih dulu.

Cerita mirip pada ketiga desa wisata ini ditemukan pada kuatnya kelompok warga yang berlaku sebagai pengelola kawasan wisata. Pengelompokan warga pengelola ini umumnya telah ada mendahului pokdarwis. Kelompok pengelola ini menjelma sebagai subkelompok (misalnya pengelompokan berbasis lorong di botubarani dan botutonuo) yang eksistensinya lebih dominan dibanding pokdarwis. Fungsi Pokdarwis tampak lebih sering muncul sebagai kerudung dari kelompok warga yang sudah eksis dan menjadi sarana untuk berhubungan, berkomunikasi, dan bernegosiasi dengan pihak luar saat berhubungan dengan urusan kepariwisataan. Pokdarwis praktis tidak punya ruang yang memadai dibanding asosiasi warga pengelola.

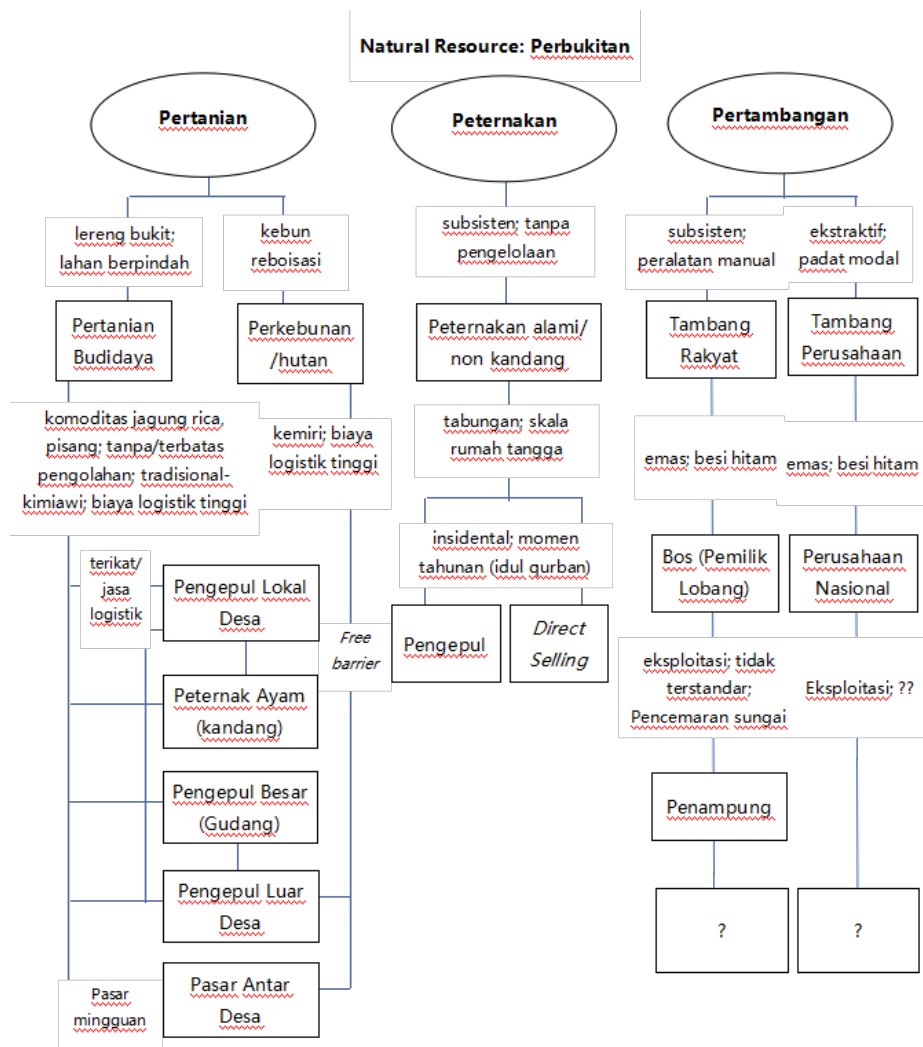
Tidak hanya pokdarwis, kerumitan untuk terlibat dalam pengelolaan di kawasan pariwisata juga sangat terbatas bagi Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Meskipun sumberdaya yang dikelola secara normatif adalah sumberdaya publik namun secara riil harus berkontestasi dengan konstruksi sebagian warga (umumnya sejak lama memang bertempat tinggal di pinggir pantai) yang

menempatkannya dalam ruang *common pool resources*, jika bukan malah mengarah ke privatisasi oleh warga.

Privatisasi di antaranya ditandai oleh penguasaan berbasis jalur area ke arah laut yang ditarik lurus dari rumah warga di pinggir pantai untuk mengusahakan berbagai layanan pendukung wisata. Penanda lainnya adalah karakteristik manajemen pengelolaan kawasan wisata yang meskipun diwadahi dalam basis subkelompok, namun karakteristiknya sebenarnya lebih berbasis privat (individual). Urusan kolektif cenderung muncul saat entitas subkelompok ini berinteraksi dengan subkelompok lainnya atau entitas di luar kelompok, terutama dalam merespon hal yang ditengarai dapat “mengganggu” eksistensi pariwisata yang dikelola oleh mereka. Urusan kolektif sayangnya tidak terlihat muncul sebagai kapasitas kelompok untuk mengelola urusan bersama yang terhubung dengan upaya mengembangkan pariwisata. Kasus wisata Botutonuo dan Botubarani menarasikan tentang lemahnya peran kolaborasi, misalnya dalam penyelenggaraan fungsi promosi dan pemasaran, fungsi pengelolaan kualitas jalan lorong, dan sebagainya. Pemupukan modal kolektif, misalnya iuran anggota, juga tidak terlihat dalam pengelolaan kelompok. Ini menempatkan model bisnis pengelolaan wisata menjadi berciri “menunggu tamu” dengan layanan seadanya berbasis kreativitas privat warga pengelolanya.



Gambar 25 Rantai Pasok Sektor Perikanan Tangkap dan Pariwisata di Desa Pesisir



Gambar 26 Rantai Pasok Sektor Pertanian, Peternakan, dan Pertambangan

4.2 Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi: Ketergantungan Ekonomi SDA dalam Pola Ekstraktif-Subsisten dan Jebakan Kelas Pekerja

Ekonomi berbasis SDA menjadi ciri utama aktivitas ekonomi warga desa. Pola dasarnya adalah ekonomi ekstraktif (membangkitkan manfaat dari alam). Pemanfaatan berbasis budidaya belum berkembang, kecuali pada pengelolaan minimalis pada sektor pertanian. Pengolahan tanah untuk menjaga kesuburan relatif tidak dilakukan. Karakter serupa juga muncul dari cara kerja pengelolaan sektor pariwisata, yang cenderung mengandalkan potensi yang sudah disediakan alam. Dampaknya, layanan kepariwisataan belum berkembang signifikan, baik dari sisi desain produk maupun promosi dan pemasaran. Praktis, hanya Pariwisata di Olele yang terlihat lebih dinamis dari sisi pengelolaan bisnis pariwisata.

Sektor ekonomi ekstraktif paling diminati karena memang paling kasat mata, tidak membutuhkan banyak prasyarat untuk masuk, serta model dan proses bisnis yang sederhana. Ini terjadi untuk sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan bahkan pariwisata. Tekanan kebutuhan warga untuk segera mendapatkan penghasilan, membuat sektor ini paling diminati dan diisi oleh SDM yang memposisikan diri sebagai kelas pekerja. Sektor ekstraktif, terutama kelautan, paling diminati oleh warga muda laki-laki yang memilih tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan PT, dengan menjadi ABK pada kapal pampo.

Namun, dari sini pula karakteristik ekonomi subsisten justru muncul, menyatu dalam ciri ekonomi ekstraktif. Ekonomi subsisten lahir dari keterbatasan kapasitas untuk mengelola sumberdaya dalam skala ekonomis yang cukup. Tekanan kebutuhan ekonomi individu membuat kelembagaan ekonomi yang ada cenderung atomistik, membawa kepentingan masing-masing, belum

Ekonomi ekstraktif-subsisten dan paduannya dengan kelembagaan ekonomi yang atomistik menjadi kerangka keterbatasan struktural yang menghasilkan rendahnya konsolidasi sumberdaya sehingga membuat rantai nilai bisnisnya masih rendah. Pada kasus sektor pariwisata, konteks struktural juga muncul pada kontestasi “klaim penguasaan” terhadap sumberdaya alam terberikan (*natural-given resources*) antara makna *common pool resources*, *private resources*, dan *public resources*. Dalam kontestasi tersebut, klaim privat dari sebagian warga yang sejak sebelumnya bermukim di daerah pinggir pantai terbilang dominan, mengeksklusi makna publik dari sumberdaya alam, termasuk memunculkan sikap resisten terhadap berbagai upaya penataan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten yang dipersepsikan sebagai campur tangan dan berpotensi mengganggu bisnis sebagian warga pengelola sektor wisata. Isu dan cara kerja pengelolaan sektor publik atas sumberdaya alam pada gilirannya makin terpinggir.

4.3 Kapasitas Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya: Manajemen Rantai Manfaat dan Resiko Pengelolaan Sumberdaya Publik

Terpinggirnnya isu publik karena desakan klaim privat atas sumberdaya membuat kemanfaatan sumberdaya ekonomi masih terbatas dinikmati oleh sebagian warga saja. Pada desa yang sudah menikmati ekonomi sektor pariwisata, situasi ini sangat terasa. Klaim privat beriringan dengan cara pandang yang menyempit dari manajemen sumberdaya, sehingga corak kompetitif lebih bergerak ke arah eksklusi, dibanding membuka berbagai ruang pengembangan ekosistemik dalam pengelolaan sumberdaya sehingga kue ekonomi bisa diperbesar dan memberikan rantai manfaat yang lebih panjang kepada banyak warga.

Karakter eksklusif bukan saja muncul dalam memposisikan dan merespon berbagai langkah kebijakan dari pemerintah desa dan kabupaten. Upaya pelibatan dari pihak luar secara menyempit dipahami sebagai upaya sepihak untuk mengambil manfaat dan dinilai justru membebani usaha ekonomi warga. Resistensi terhadap wacana retribusi dalam ruang PADes dan PAD berada pada pemahaman ini.

Namun, eksklusif bahkan bergerak lebih jauh. Penyempitan cara pandang sebagian warga juga muncul dalam resistensi terhadap inisiasi sebagian warga yang mengaktivasi sektor pariwisata perbukitan. Meski terbukti bekerja baik, wisata perbukitan tidak dapat berlanjut karena dipandang sebagai kompetitor wisata pantai dan kegagalan para inisiator dan warga menyepakati bagaimana manajemen dan distribusi manfaat ekonomi. Tantangan operasionalisasi isu publik kembali muncul dalam konteks tersebut. Klaim privat kembali mengganggu, namun pelakunya bergeser pada warga yang dilintasi lahannya untuk jalur wisata perbukitan.

Sayangnya, momentum ini gagal dikelola dan dijumpai solusinya oleh pihak desa maupun kecamatan. Isu publik dan pengelolaan sumberdaya publik masih gagal dioperasionalkan dan diperluas kapasitasnya untuk optimalisasi dan pengembangan sumberdaya ekonomi yang lebih lebar dan terdistribusi. Akibatnya, rantai manfaat dari aktivitas ekonomi, misalnya pariwisata, masih sangat terbatas baik dari ragam produk barang dan jasa wisata yang ditawarkan maupun pihak-pihak yang menerima manfaat dari pertumbuhan pariwisata desa. Perpanjangan rantai manfaat adalah kecermatan menempatkan sektor atau komoditas tertentu sebagai penggerak dari sektor atau komoditas lainnya. Lemahnya pendekatan eksosistemik dalam pengelolaan sumber-

Melalui pendekatan tersebut, kapasitas para pelaku, baik warga, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk mengoperasionalkan isu dan barang publik ke dalam perluasan/pemanjangan rantai manfaat perlu dilakukan. Ekosistem inovasi untuk menemukan dan merekayasa sumberdaya ekonomi baru dan terbarukan dalam rantai manfaat ekonomi yang sudah berjalan menjadi penting. Selain pengelolaan terhadap manfaat, cara kerja serupa digunakan dalam mengelola resiko atau ekstenalitas yang muncul dari sektor ekonomi yang dikembangkan. Dengan cara ini, degradasi kualitas lingkungan yang menjadi ancaman karena nalar privat dan kelembagaan sosial-ekonomi atomistik perlu ditata sehingga hal-hal residu bisa dikelola, misalnya pengelolaan sampah, penanganan banjir, longsor, dan sebagainya. Skenario inovasi dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya dapat ditata dari sini.

4.4 Kapasitas Politik dalam Pengelolaan Sumberdaya: Leadership dan Governability dalam Inovasi Pengelolaan Sumberdaya Publik

Terbangunnya ekosistem inovasi dalam pengelolaan sumberdaya publik di desa bukan semata urusan sosial dan ekonomi, namun juga politik. Sebagai satuan politik dan pemerintahan, desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya desa, baik dalam internal desa maupun melalui kerjasama antardesa. Namun, ada beberapa prasyarat politik yang memang harus dipenuhi, salah satunya yang utama adalah kepemimpinan politik di desa, yang salah satu peran utamanya oleh Kepala Desa.

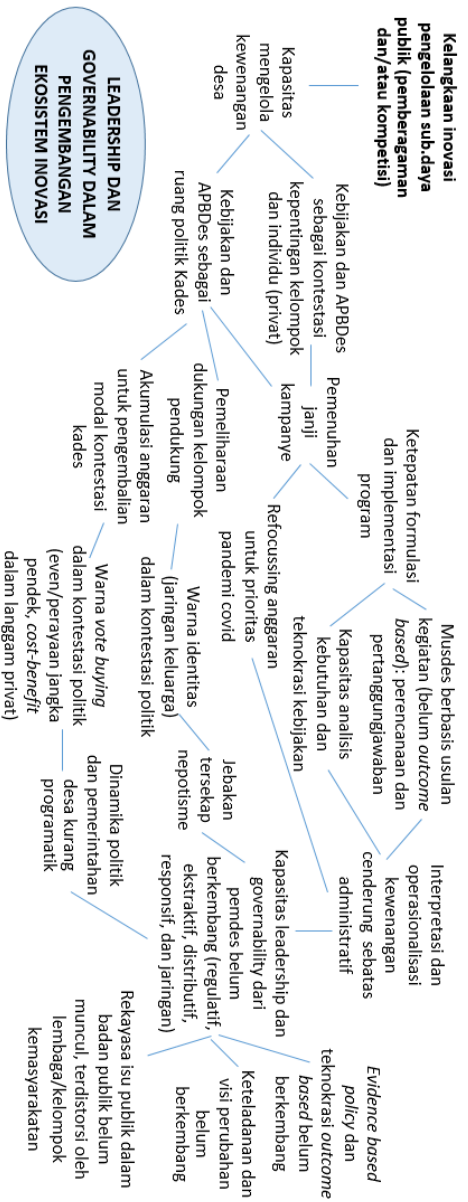
Hasil kepemimpinan politik yang baik mensyaratkan proses suksesi yang bersih dan menempatkan desa sebagai entitas publik, bukan milik kelompok tertentu. Dalam konteks tersebut, konstruksi pilkades secara langsung memang sering menjebak



Gambar 29. Diskusi Pra Assessment dengan Stakeholder Botubarani

produk pemimpin yang lahir dalam sekapan pada kepentingan kelompok pendukung di satu sisi, baik karena jaringan sosiologis atau kekerabatan, maupun praktik politik uang dalam proses pemilihan. Hasil dari proses elektoral di desa-desa yang ada saat ini umumnya masih tejobak dalam keduanya.

Pelunakan terhadap keterbatasan struktural ini, sebenarnya dimungkinkan jika proses pemerintahan dalam mengelola sumberdaya di desa lebih bisa digerakkan dengan menggunakan data sebagai muara dari setiap pembahasan dan pengambilan keputusan kebijakan di desa. Sejauh ini, mekanisme partisipasi dalam tata kelola desa memang telah diwadahi dalam musyawarah desa sebagai forum tertinggi, namun umumnya masih menyisakan keterbatasan kualitas proses dan hasil, baik karena dominasi dari pihak-pihak tertentu ataupun “bawaan” dari struktur sosial yang eksis, misalnya hal akses dan keterlibatan perempuan, kelompok rentan, dan sebagainya. Partisipasi yang berkualitas perlu mempertimbangkan sisi inklusif.



Gambar 30 Rantai Isu Kepemimpinan dan Governability dalam Inovasi Kebijakan Berbasis Data

Selain inklusif, partisipasi juga hal kualitas. Pada sisi ini, pengelolaan kebijakan berbasis data dalam skema perencanaan berbasis *outcome* menjadi penting dan memang belum banyak berkembang. Data-data di desa masih belum banyak diolah dan diinterpretasikan sehingga membantu mendudukkan orientasi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan desa, baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Efektivitas *governability* dapat didongkrak dengan merapikan sistem data dan informasi untuk kebijakan desa, sehingga bisa mendudukkan posisi desa sebagai entitas publik.

V

Rancangan Model Pembangunan Kawasan Perdesaan

5.1 Konstruksi Model Pembangunan Kawasan Perdesaan

Rancangan konstruksi model pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bone Bolango berikut ini dibatasi lokusnya pada desa di kawasan pesisir, khususnya desa di Kecamatan Kabila Bone. Tantangan utama di fase awal dalam rekayasa pengembangan kawasan perdesaan berada pada bagaimana menginternalisasi nilai-nilai publik ke dalam isu dan praktik (yang berulang) sebagai langgam kerja dari berbagai ruang interaksi yang menghubungkan beragama aktor yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan. Aktor yang dimaksud bisa mencakup entitas warga, pemerintah desa, pemerintah supra desa, swasta, dan lainnya.

Konstruksi dari model ini bersandar pada pentingnya menemukan kembali kesetimbangan dari nilai dan praktik publik terhadap praktik individual-privat. Bercermin pada kasus pengelolaan sumberdaya alam (publik) di 4 (empat) desa di kawasan pesisir,

gerak privatisasi tidak selalu muncul dari penetrasi kekuatan modal, namun justru dari klaim sebagian warga atas nama asal-usul. Dalam UU Desa No. 6/2014, asal-usul punya klausul unik, dapat diakui sebagai kewenangan asli desa yang umumnya terhubung dengan *common pool resources* (pelembagaannya didekati melalui desa adat). Sayangnya, klaim asal-usul pada kasus desa pesisir lebih mendekati hak untuk mengeksklusi pihak dari luar, termasuk resisten terhadap kedudukan dan kewenangan desa dan supra desa. Ruang interaksi-kolaborasi bukan tidak dimungkinkan, namun cenderung dipandu oleh nilai pragmatis-transaksional.

Dalam konteks tersebut, model pembangunan kawasan perdesaan yang diajukan di sini, akan dikonstruksi sebagai arena untuk membawa kembali narasi publik sebagai cara kerja pembangunan kawasan (*bringing the public back in*) untuk mempertemukan, mendekatkan, dan menegosiasikan kepentingan parapihak. Lingkup makna publik tentu bukan monopoli entitas Pemerintah Kabupaten (supradesa), namun juga pemerintah desa dan warga desa.



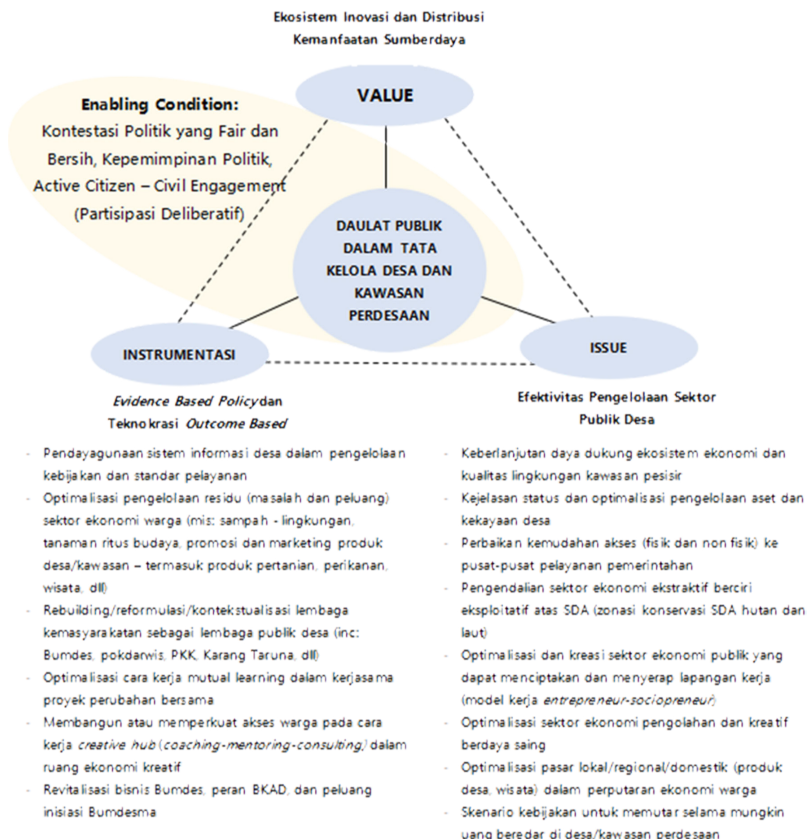
Gambar 31.
Paparan Hasil
Assessment
Kepada
Pemkab Bone
Bolango

Sebagai arena, konstruksi model ini selanjutnya didudukkan di dalam 3 (tiga) aspek utama yang saling mempengaruhi, yaitu nilai, isu, dan instrumentasi. Aspek nilai (value) mendudukkan posisi publik sebagai mata air yang memproduksi/mereproduksi makna dari sumberdaya, sehingga di dalamnya melekat sekian nilai terkait otoritas kebijakan, keberlanjutan, antimonopoli, kolaborasi, penjaminan, perlindungan, redistribusi, dan sebagainya. Realitas ketimpangan atas akses atau kapasitas memanfaatkan sumberdaya acapkali memang tidak terhindari, sehingga aspek value justru harus memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumberdaya bisa dinikmati sebanyak mungkin pihak (*no one left behind*). Lingkup aspek ini berada dalam fase *agenda setting* kebijakan.

Aspek isu mendudukkan bagaimana menerjemahkan nilai ke dalam prioritas kebijakan yang dinilai efektif untuk memastikan keadilan manfaat dari pengelolaan sumberdaya. Lingkup aspek ini berada dalam fase formulasi kebijakan. Sedangkan aspek instrumentasi melingkupi bagaimana perumusan kebijakan teknis-operasional, yang memungkinkan perulangan praktik secara terus-menerus yang dapat memperkuat posisi kebijakan (formulasi isu kebijakan) dan meneguhkan makna dari isu publik. Lingkup aspek ini berada dalam rentang fase alokasi dan implementasi kebijakan. Interaksi sirkular diantara aspek nilai, isu, dan instrumentasi akan menunjukkan seberapa efektivitas kebijakan yang dipilih untuk menentukan kelanjutan atau perbaikan kebijakan. Ini menandai fase evaluasi dan terminasi/reformulasi kebijakan.

Berdasarkan temuan lapangan, konstruksi model pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Kabila Bone disajikan dalam skema berikut ini:

- Pengembangan dan operasionalisasi kewenangan desa
- Optimalisasi sumberdaya pada barang publik berbasis keberlanjutan dan konservasi
- Penemuan, kreasi, dan pengelolaan sumberdaya baru (termasuk *renewable resources* dan ekonomi kreatif)
- Redistribusi kemanfaatan sumberdaya ekonomi secara interdependen dan sirkular (*sharing*)
- Perlindungan dan penjaminan standar hidup warga marjinal (*caring*)
- Pengembangan aset dan kekayaan desa
- Penciptaan mutual benefit/profit inter dan antar desa



Gambar 32 Bringing The Public Back In: Rekayasa Wacana Publik dalam Tata Kelola Desa dan Kawasan Perdesaan

5.2 Desain Model dan Tahapan Transisi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sebagai cara kerja, narasi publik dalam rekomendasi desain model pengembangan kawasan perdesaan di Kabila Bone dapat digerakkan melalui 3 (tiga) matra struktur dalam 3 (tiga) tahap transisi yang dioperasionalkan dalam rantai siklus 6 (enam) proses kebijakan. Berikut ini adalah penjelasan dari desain model tersebut.

Dalam perspektif strukturasi, tiga matra struktur mencakup stuktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Struktur signifikasi melingkupi cara kerja membangun sistem tanda untuk menunjukkan eksistensi urusan publik sebagai domain kepentingan bersama. Tidak terbatas pada kepentingan kolektif warga, urusan publik menjadi ruang untuk mengerangkai pentingnya mengelola eksternalitas (dampak masalah dan peluang pengembangan) dari urusan privat maupun sosial yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh warga. Struktur dominasi melingkupi cara kerja mengoperasionalkan sistem tanda ke dalam seperangkat sistem aturan, baik konsensus, norma, maupun regulasi untuk membangun kepastian kesukarelaan dan kepatuhan. Sedangkan struktur legitimasi menjadi penentu untuk memastikan sistem perulangan praktik tindakan yang mengakui sistem tanda dan aturan.

Tahapan transisi mewakili lingkup penakaran tahapan/fisibilitas perubahan yang diharapkan, diawali dari fase *creating value*, *managing value*, dan *extending value*. Fase *creating value* menandai aktivasi pembentukan nilai publik dari urusan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam kerangka yang lunak, fase *creating value* mengambil area pada bagaimana menciptakan jejak pelayanan publik yang mudah dikenali oleh warga, dengan mengambil sektor pelayanan dasar dan pelayanan terhadap sektor “residu” seperti

sampah dan dampak lingkungan. Fase *managing value* menyoar pada bagaimana meningkatkan atau memperkuat lingkup dan kinerja pelayanan publik pada sektor ekonomi produktif yang ditekuni warga dan peluang membuka aktivasi sektor ekonomi kreatif. Sasaran sektor yang dipilih menyangkut pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata dengan menyoar peningkatan efektivitas-efisiensi produksi dengan cara kerja agregasi. Pada fase lanjut, yaitu *extending value*, menyoar area pembangunan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah (lintas kecamatan, lintas daerah), melampaui sekat spasial ataupun administratif. Pada fase ini, penentu keberhasilan dapat diringkas ke dalam sektor/komoditas unggulan dari kawasan.

Ketiga matra struktur dan tahapan transisi di atas selanjutnya dioperasionalkan prosedur kerjanya dalam siklus proses kebijakan. Kejelasan agenda setting dan formulasi kebijakan akan menentukan kualitas perencanaan, dan memandu keragaman metode dan teknik Implementasi kebijakan. Selanjutnya, kualitas pemantauan dan evaluasi yang berbasis bukti (*evidence based*) akan menentukan apakah kebijakan yang dijalankan dapat diteruskan, direformulasi, atau dihentikan.



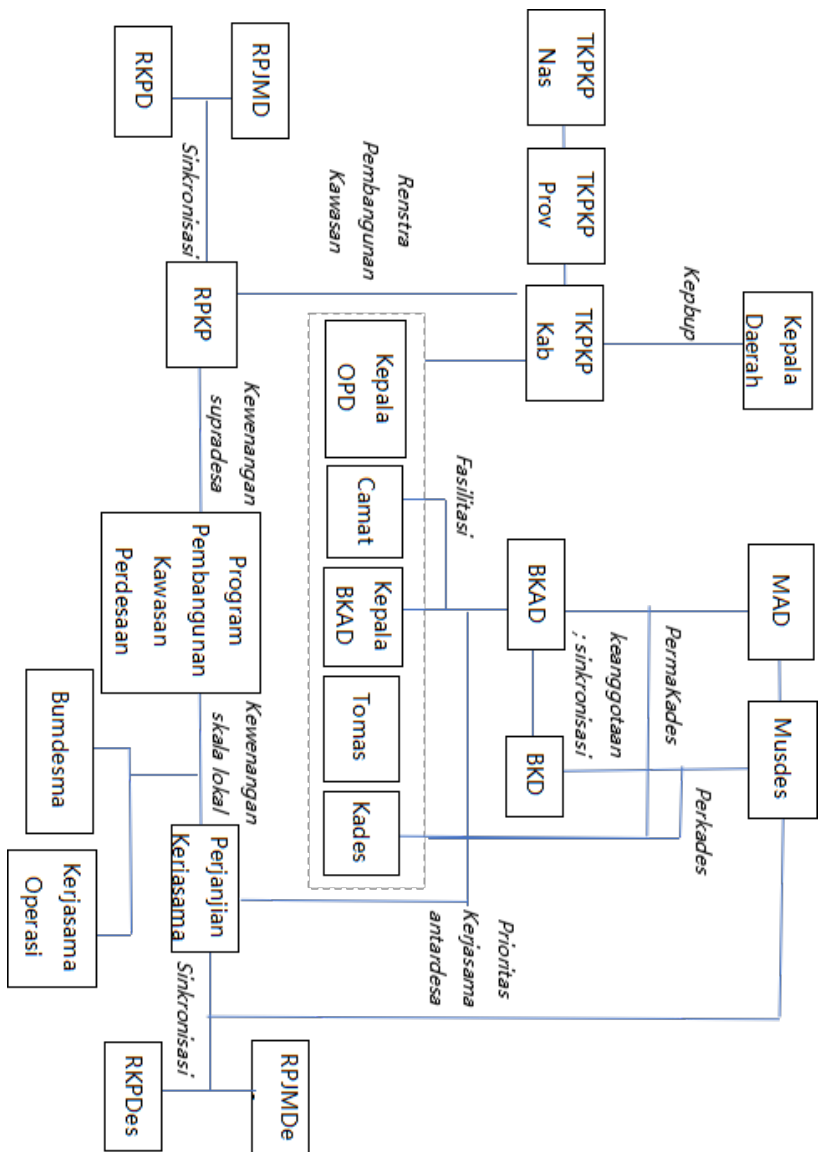
Gambar 33 Desain Model Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Kabila Bone

5.3 Desain Model Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Kerjasama Antardesa

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu persilangan titik temu antara skenario teknokrasi pembangunan desa dari atas (*top-down*) dan teknokrasi antar desa dari bawah (*bottom-up*). Dalam perspektif pemerintahan daerah, kawasan perdesaan adalah perjumpaan antara skema otonomi daerah yang dalam kerangka UU No. 32 tahun 2004 berujung di Pemerintah Kabupaten/Kota dan skema otonomi desa dalam kerangka UU No. 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengurus dirinya baik dalam kewenangan skala lokal (perluasan lingkup subsidiaritas terhadap UU No. 32 tahun 2004) dan rekognisi atas kewenangan asal-usul.

Persilangan urusan juga ditandai oleh “pemisahan” kewenangan pengaturan desa antara rezim pembangunan desa oleh Kemendesa PDTT melalui Permendesa PDTT No. 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan rezim pemerintahan desa oleh Kemendagri melalui Permendagri No. 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Penanda persilangan juga ditandai oleh bagaimana mempertemukan antara arus pembangunan kawasan perdesaan dalam skema kewenangan daerah dan kewenangan desa-antardesa.

Konsekuensinya, diperlukan siasat tertentu yang dapat menjembatani perbedaan skenario kelembagaan pembangunan desa berperspektif kawasan, selain tentu saja adaptif terhadap kondisi existing pada desa-desa di Kabupaten Bone Bolango. Berikut ini adalah tawaran model kelembagaan pembangunan kawasan perdesaan sebagai titik temu setelah menimbang berbagai hal tersebut:



Gambar 34 Desain Model Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Kerjasama Antardesa

VI

Penutup

Kami menyadari bahwa upaya membangun ekosistem desa berdaulat sebagai tempat hidup yang layak dan bermartabat membutuhkan komitmen kuat, serta dukungan dari berbagai pihak. Apresiasi setinggi – tingginya kami haturkan kepada para pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan model penguatan ekosistem kemandirian kawasan perdesaan. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada :

1. Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari
2. Bupati Kabupaten Bone Bolango
3. Bappeda Kabupaten Bone Bolango
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango
5. Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bone Bolango
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone Bolango
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango

8. Pemerintah dan Masyarakat Desa Botubarani
9. Pemerintah dan Masyarakat Desa Botutonuo
10. Pemerintah dan Masyarakat Desa Molutabu
11. Pemerintah dan Masyarakat Desa Olele
12. Pemerintah dan Masyarakat Desa Bondawuna
13. Konsorsium Paredice :
 - Parompong Waste Management
 - Raw House
 - Evo & Co.
 - Divers Clean Action
 - Carbon Ethics
14. Komunitas Japesda
15. Komunitas Kekraf
16. Dan segenap pihak lain yang memberikan sumbangsih pengetahuan dan gagasan.

Operated by:



Supported by:

